



**PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS DALAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh

Syaodatiningtih

NIM : 970810101176

Asal:	Hadiah	Klass
	Pembelian	338.9
Terima Tol :	11 APR 2002	SYA
No. Induk :	0645	P
KLASIR / PENYALAH :	SRS	

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2 0 0 2

JUDUL SKRIPSI

PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS DALAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : SYAODATININGSIH

N. I. M. : 970810101176

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

09 MARET 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Drs. Bambang Yudono, MM

NIP. 130 355 409

Sekretaris,

Teguh Hadi P, SE.M.Si

NIP. 132 092 300

Anggota,

Drs. Badjuri, ME

NIP. 131 386 652



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

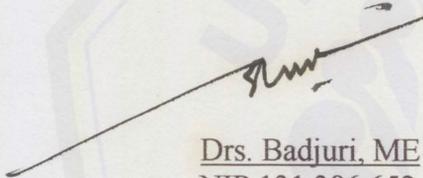
Drs. H. Liakip, SU

NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

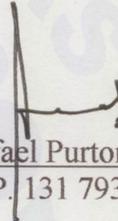
Judul Skripsi : Penentuan Sektor Prioritas Dalam Peningkatan
Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Lamongan
Nama Mahasiswa : Syaodatiningsih
N I M : 970810101176
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I



Drs. Badjuri, ME
NIP.131 386 652

Pembimbing II



Drs. Rafael Purtomo S, Msi
NIP.131 793 384

Ketua Jurusan

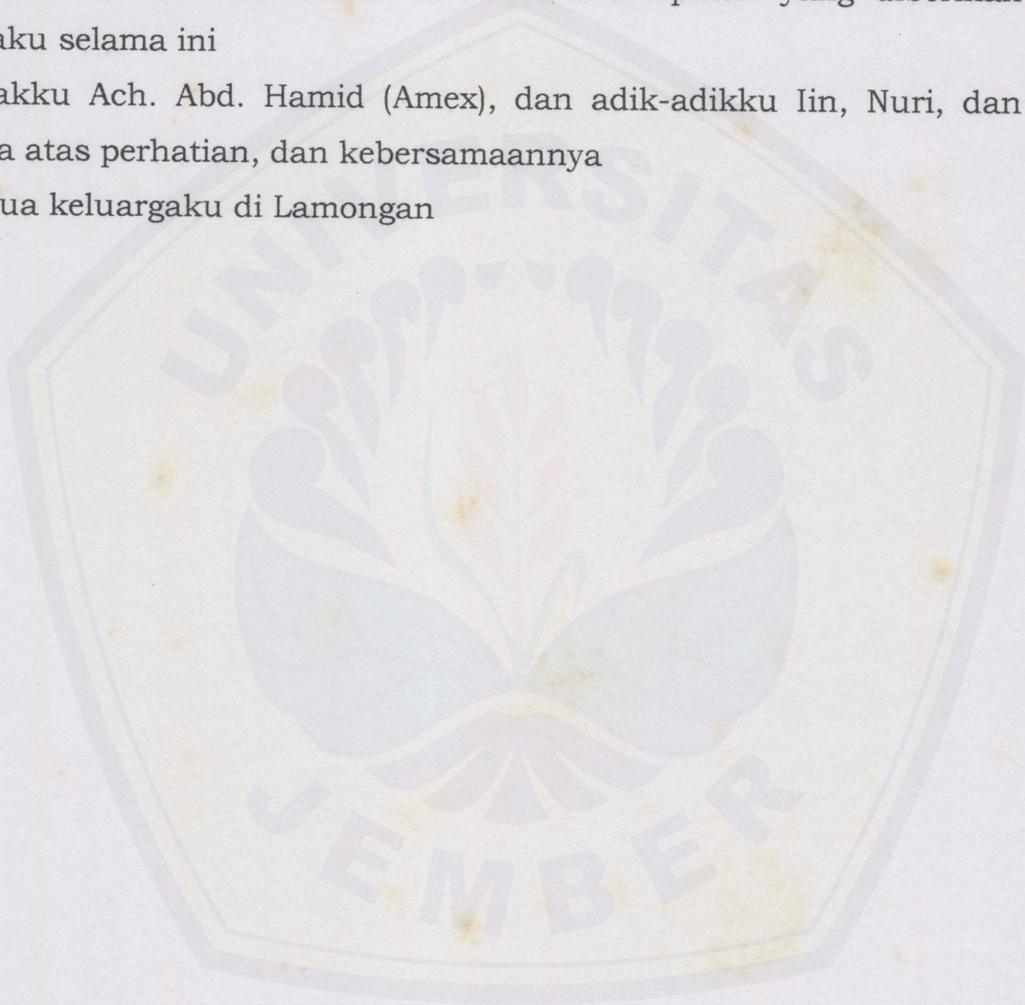


Dra. Aminah, MM
NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : Maret 2002

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak H. Suhadak dan Ibu H. Nasrikhah atas kasih sayang dan doanya padaku
2. Almarhumah Ibunda H. Ruqoiyah, semoga engkau tenang di sisinya
3. Mbah buyutku H. Siti Khodijah, Pakde H. Munir dan makde H. Sugiarti, terima kasih atas doa dan kesempatan yang diberikan padaku selama ini
4. Kakakku Ach. Abd. Hamid (Amex), dan adik-adikku Iin, Nuri, dan Dana atas perhatian, dan kebersamaannya
5. Semua keluargaku di Lamongan



Motto :

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “ **(Q. S. Arra'du : 11)**

“ Orang bisa disebut besar jika berdiri di atas kemampuannya sendiri “
(Pierre Joseph Proudhon)

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan sektor prioritas dalam peningkatan pembangunan ekonomi Kabupaten Lamongan, dengan menggunakan metode analisis sektor prioritas dan analisis pergeseran struktur ekonomi. Analisis sektor prioritas untuk menentukan sektor prioritas yang akan dikembangkan di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan indikator *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan analisis kekuatan pergeseran struktur ekonomi dengan menggunakan *Coefisient Resuffle (CR)* untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang mengalami penguatan di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis *LQ* didapat dua sektor yang merupakan sektor basis yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Dari perhitungan *DLQ* diperoleh kesimpulan lima sektor yang dapat diprioritaskan di masa yang akan datang yaitu sektor pertambangan dan penggalian, bangunan, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, industri pengolahan, dan jasa-jasa.

Perhitungan dengan analisis koefisien pergeseran diperoleh kesimpulan sektor yang menunjukkan pergeseran ekonomi adalah sektor pertanian, bangunan, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Dan dari perhitungan skalling pada *LQ*, *DLQ*, koefisien pergeseran, dan PAD diperoleh kesimpulan sektor yang merupakan sektor prioritas di Kabupaten Lamongan adalah sektor pertanian dengan nilai skalling 100, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan nilai skalling 83,48, diikuti sektor jasa-jasa yang menempati urutan ketiga dengan nilai skalling sebesar 44,60. Sektor-sektor lain yang menjadi sektor prioritas secara berurutan adalah sektor perdagangan, hotel, dan, restoran, bangunan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, dan dari hasil analisis tersebut sektor angkutan dan komunikasi merupakan sektor prioritas urutan terakhir.

(kata kunci : Sektor Prioritas)

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang penulis panjatkan segala puji syukur kehadirat-Nya atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN “

Dalam pelaksanaannya sejak penelitian hingga tersusunnya skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

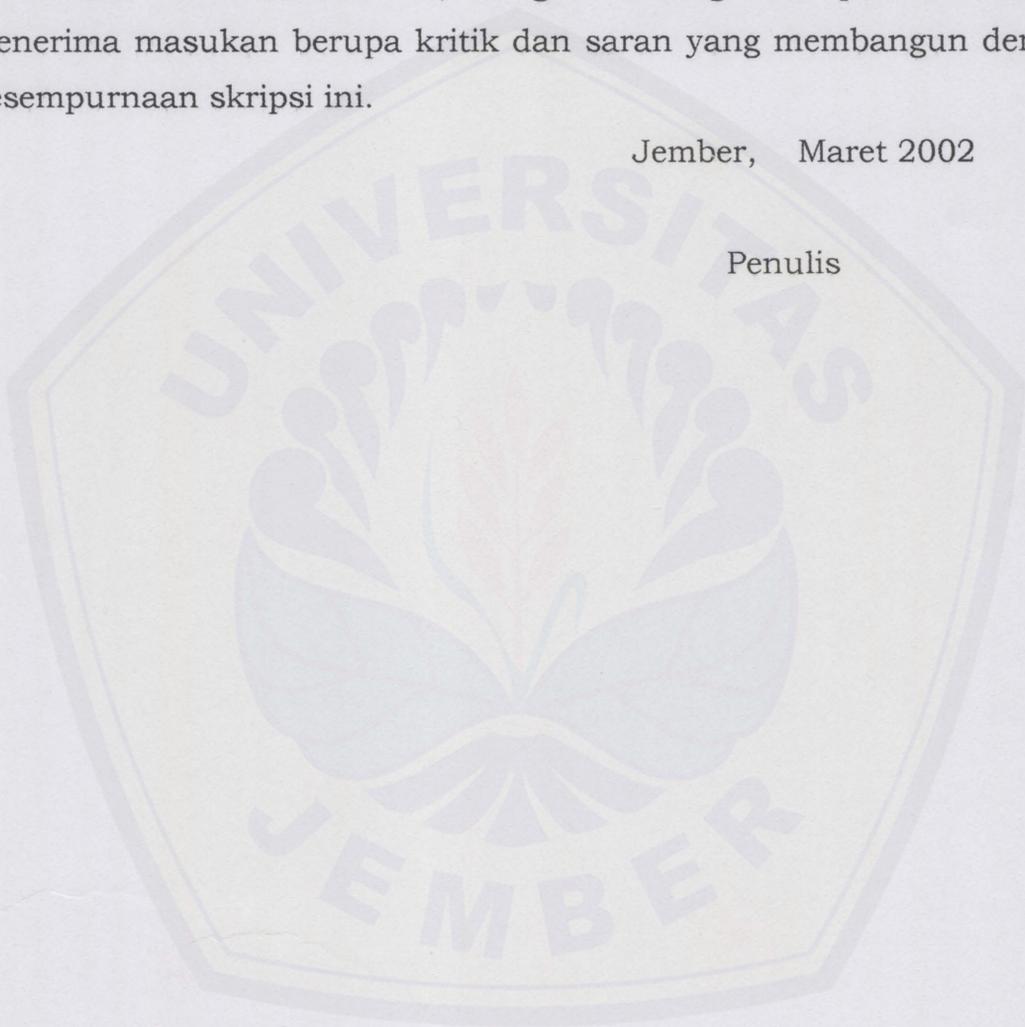
1. Bapak Drs. Badjuri, ME dan Bapak Drs. Rafael Purtomo Somaji, Msi sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu serta dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ibu Dra. Aminah, MM sebagai dosen wali beserta seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan.
3. Seluruh staff Kantor Statistik Kabupaten Lamongan, Kantor Statistik Jawa Timur, dan Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang telah memberikan bantuan kepada penulis guna pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabatku: Linda, Anis, Ira dan Sonny terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.
5. Teman-teman perencanaan, dan teman-teman Ekspor 97.

6. Sahabatku Bu Ndari, mbak Candri, Liliem, Mufar, Wati, Itha, Febri, Wulan, dan semua anak kost Jawa II/14 atas kebersamaan
7. Semua crew buwana komputer atas bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini sangat sederhana. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis akan menerima masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, Maret 2002

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	7
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	8
2.2.2 Model Ekonomi Basis	10
2.2.3 LQ dan DLQ	14
2.2.4 Koefisien Pergeseran (CR)	17
2.2.5 Analisis Skalogram	18
2.2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2.2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	22
3.1.1 Jenis Penelitian	22
3.1.2 Unit Analisis	22
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu	23
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	23
3.4 Metode Analisis Data	23
3.4.1 Analisis Sektor Prioritas.....	23
3.4.2 Analisis Kekuatan Pergeseran Struktur Ekonomi.....	27
3.5 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran.....	28

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	29
4.1.1 Keadaan & Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan..	29
4.1.2 Kependudukan	29
4.1.2.1 Keadaan Penduduk	29
4.1.2.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	30
4.1.2.3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian	31
4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan.....	32
4.1.4 Distribusi PDRB.....	35
4.1.5 Struktur Perekonomian Kabupaten Lamongan	36
4.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37
4.2 Analisis	39
4.2.1 Diskripsi Hasil Penelitian	39
4.2.2 Analisis LQ	43
4.2.3 Analisis DLQ.....	48
4.2.4 Analisis Koefisien Pergeseran	50
4.2.5 Analisis Penentuan Sektor prioritas.....	51

4.3 Pembahasan54

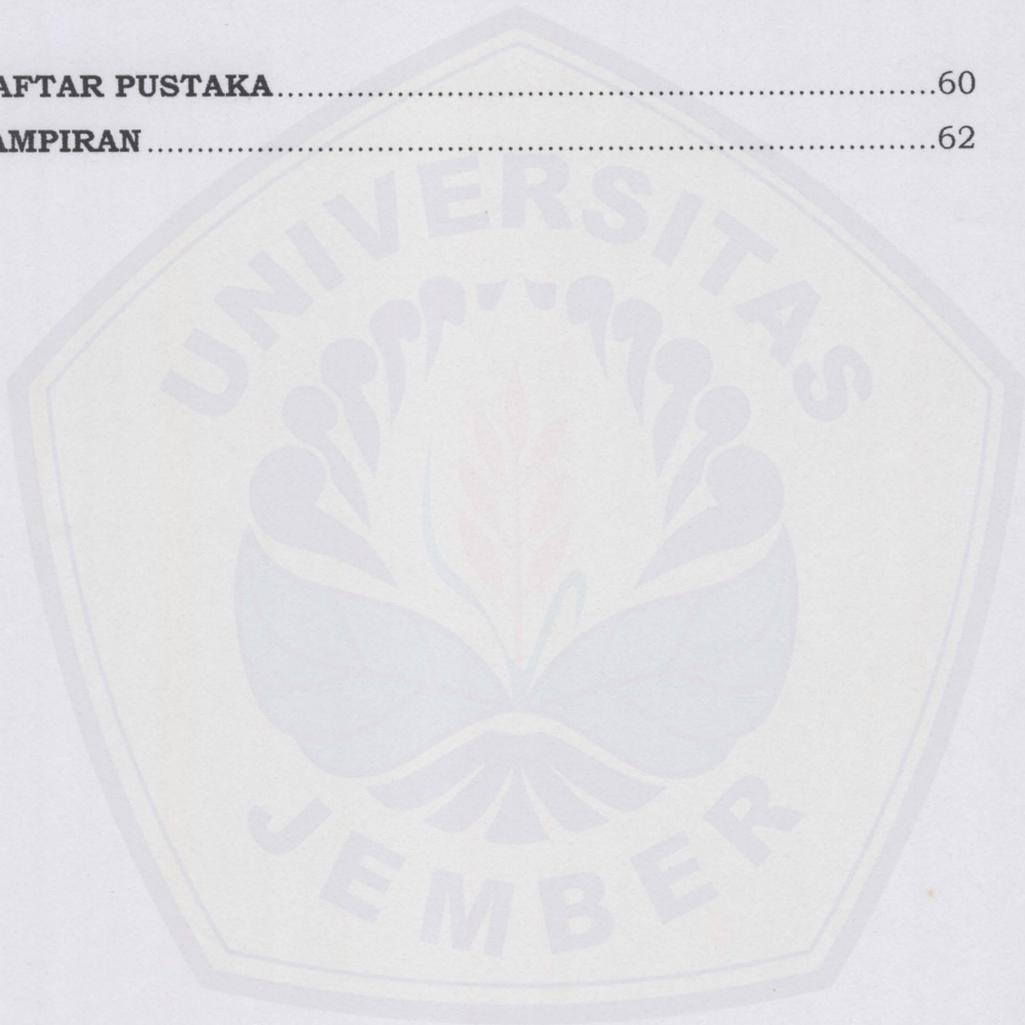
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan58

5.2 Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA.....60

LAMPIRAN62



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 (jiwa/km ²).....	30
3.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2000 (jiwa).....	30
4.	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamongan Tahun 2000 (jiwa).....	32
5.	Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Lamongan Tahun 1994-1999 ADHK 1993 (dalam persen).....	34
6.	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 ADHK 1993 (dalam persen).....	36
7.	Struktur Perekonomian Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 ADHK 1993 (dalam persen).....	37
8.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Periode 2000-2001 (dalam juta rupiah)	39
9.	Kontribusi sektoral PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamongan Tahun 1993-1999 ADHK 1993 (dalam persen).....	41
10.	Kontribusi sektoral PDRB Menurut Lapangan Usaha di Propinsi Jawa Timur Tahun 1993-1999 ADHK 1993 (dalam persen).....	43
11.	Hasil Perhitungan LQ Per Sektor Kabupaten Lamongan Tahun 1993-1999 ADHK 1993.....	45

12. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 ADHK 1993.....	46
13. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 ADHK 1993	47
14. Perhitungan Nilai DLQ Kabupaten Lamongan	50
15. Hasil Perhitungan Coefisient Pergeseran Sektor Ekonomi tahun 1996-1999 ADHK 1993	51
16. Penentuan Sektor Prioritas Berdasar Analisis Skalogram LQ, DLQ, CR, PAD Tahun 1993-1999 di Kabupaten Lamongan.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 1993-1999 ADHK 1993 (dalam juta rupiah).....	62
2.	PDRB Propinsi Jawa Timur Tahun 1993-1999 ADHK 1993 (dalam juta rupiah).....	63
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 1994-1999 ADHK 1993 (dalam Persen)	64
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Kabupaten Lamongan Tahun 1994-1999 ADHK 1993 (dalam Persen)	65
5.	Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 1993-1999 (dalam persen)	66
6.	Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Pembentukan PDRB Jawa Timur Tahun 1993-1999 (dalam persen)	67
7.	Perhitungan LQ Tahun 1993 Kabupaten Lamongan ADHK 1993	68
8.	Perhitungan LQ Tahun 1994 Kabupaten Lamongan ADHK 1993.....	69
9.	Perhitungan LQ Tahun 1995 Kabupaten Lamongan ADHK 1993	70
10.	Perhitungan LQ Tahun 1996 Kabupaten Lamongan ADHK 1993.....	71

11. Perhitungan LQ Tahun 1997 Kabupaten Lamongan ADHK 199372.....	72
12. Perhitungan LQ Tahun 1998 Kabupaten Lamongan ADHK 1993.....	73
13. Perhitungan LQ Tahun 1999 Kabupaten Lamongan ADHK 1993.....	74
14. Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Tahun 1996 Kabupaten Lamongan ADHK 1993.....	75
15. Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Tahun 1997 Kabupaten Lamongan ADHK 1993.....	76
16. Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Tahun 1998 Kabupaten Lamongan ADHK 1993.....	77
17. Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Tahun 1999 Kabupaten Lamongan ADHK 1993.....	78
18. Perhitungan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Lamongan Tahun 1993-1999 ADHK 1993.....	79
19. Perhitungan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Per Sektor Propinsi Jawa Timur Tahun 1993-1999 ADHK 1993.....	80
20. Perhitungan DLQ Per Sektor Kabupaten Lamongan ADHK 1993.....	81
21. PAD Kabupaten Lamongan Tahun 2000-2001 (dalam juta rupiah)	82
22. Perhitungan CR Sektor Prioritas Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 ADHK 1993.....	83



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari setiap negara adalah mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara mempunyai perbedaan prinsipil yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Pembangunan yang dilakukan secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat (Supriatna, 2000:13).

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya (Sinar Grafika, 1999:6).

Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumberdaya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait, dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan bidang ekonomi

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1993:65).

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi juga harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui runtutan peristiwa yang akan timbul dalam mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan selanjutnya (Arsyad, 1999:6).

Bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional adalah pembangunan ekonomi daerah. Definisi dari pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).

Keberhasilan pembangunan memerlukan adanya suatu perencanaan, demikian pula pembangunan ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi alasan pembangunan ekonomi bertujuan :

1. mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang terbatas agar bisa efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan;

2. perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap dan berkesinambungan;
3. stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur (Arsyad, 1999:23).

Perencanaan pembangunan ekonomi harus mengandung unsur-unsur pokok antara lain: 1). adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan; 2). adanya kerangka rencana makro hubungan variabel pembangunan dan implikasinya; 3). perkiraan-perkiraan sumberdaya bagi pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan; 4). adanya kebijaksanaan pemerintah yang konsisten; 5). adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral; 6). administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut (Arsyad, 1999:22).

Pembangunan wilayah merupakan pembangunan berencana. Pembangunan berencana adalah pembangunan yang bercirikan dengan diketahuinya hal-hal antara lain: a). kejelasan masalah yang dihadapi; b). kejelasan tujuan; c). kejelasan pembagian kerja; d). kejelasan tahapan pelaksanaan pembangunan dan; e). kejelasan pengertian (Budiharsono, 1989:34).

Salah satu aspek pertimbangan dari suatu perencanaan pembangunan daerah adalah dengan konsep keunggulan komparatif. Pemilihan secara tepat terhadap sektor-sektor yang berperan penting dan mendapat prioritas untuk dikembangkan lebih dahulu di suatu daerah diperlukan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Prioritas tersebut dapat ditentukan dengan melihat keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lainnya serta melihat sektor penghasil nilai ekspor yang besar. Hal ini berarti

disamping pengembangan sektor tersebut juga dapat memberikan surplus neraca pembayaran sebesar-besarnya, sehingga dapat dipergunakan untuk akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi selanjutnya (Irawan dan Suparmoko, 1992:265).

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam pembangunan nasional adalah pembangunan daerah. Jawa Timur sebagai salah satu propinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi di tahun 1996 sebesar 8,26%, tahun 1997 sebesar 5,02% , pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga -16,22% hal ini dikarenakan karena krisis moneter yang melanda negara kita dan tercermin dari negatifnya pertumbuhan ekonomi di hampir semua sektor (BPS Propinsi Jawa Timur, 1999:425).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang berpotensi dalam menyumbangkan pertumbuhan pendapatan bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Secara kuantitatif peranan tiap-tiap sektor dapat dilihat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten Lamongan merupakan daerah agraris sehingga sektor pertanian mempunyai peranan penting bagi perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 1996 sebesar 6,76%, tahun 1997 sebesar 4,64%, tahun 1998 sebesar -5,1%, tahun 1999 sebesar 2,12%. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 1998 negatif karena terjadinya krisis moneter (BPS Kabupaten Lamongan 1999:13).

1.2 Perumusan Masalah

Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mencapai alokasi penggunaan sumberdaya-sumberdaya ekonomi secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan di berbagai sektor ekonomi (Arsyad, 1999:175).

Pengembangan metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tergantung perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada (Arsyad, 1999:114).

Berkaitan dengan kebutuhan akan pembangunan wilayah (regional) yang cermat dan menyeluruh, maka perlu adanya suatu kebijaksanaan yang mendukung dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang terbatas, agar kebijaksanaan pembangunan untuk masing-masing wilayah dapat ditentukan secara lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan potensi pembangunan yang terdapat pada masing-masing wilayah. Peranan sektor atau sub sektor ekonomi tahun 1993-1999 sangat besar, karena dalam periode pembangunan tersebut terdapat dua kondisi perekonomian yaitu kondisi krisis dan kondisi normal, maka dari itu diperlukan adanya kebijaksanaan yang terarah bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diadakan penelitian tentang:

1. sektor atau sub sektor manakah yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan;
2. seberapa besar kekuatan pergeseran suatu sektor atau sub sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan tahun 1996-1999.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. sektor atau sub sektor yang diprioritaskan di Kabupaten Lamongan;
2. sektor atau sub sektor yang mempunyai kemampuan tertinggi menggeser struktur ekonomi di Kabupaten Lamongan tahun 1996-1999.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai :

1. bahan informasi dan masukan bagi pejabat-pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lamongan guna dijadikan dasar pertimbangan kebijaksanaan pembangunan ekonomi ;
2. bahan informasi dan pembandingan bagi pembaca dan peneliti lain yang berminat meneliti masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis Penelitian	Kesimpulan
1. Mutoharoh, 1998, Analisis Penentuan Prioritas Pembangunan Ekonomi Wilayah Kabupaten Tingkat II Mojokerto Tahun 1996.	1. untuk mengetahui sektor atau sub sektor yang menentukan pembangunan di Kabupaten Mojokerto ;	1. menggunakan metode <i>Location Quetient</i> (LQ)	1. diketahui terdapat tiga sektor basis yang menjadi sektor pemimpin, yaitu sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan hotel dan restoran;
2. Erna Irawati, 2000, Analisis Penetapan sektor Prioritas Dalam Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994 -1998	1. untuk mengetahui sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tahun 1994-1998;	1. menggunakan metode analisis <i>Location Quetient</i> (LQ)	1. diketahui terdapat empat sektor basis yaitu sektor pertanian; sektor jasa-jasa; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;

	<p>2. untuk mengetahui kekuatan sektor-sektor lain sebagai prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten daerah Tingkat II Bojonegoro</p>	<p>2. menggunakan metode analisis <i>Coefisient Resuffle</i> (CR)</p>	<p>2. diketahui bahwa sektor yang mempunyai kecenderungan menguat adalah sektor pertanian; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.</p>
--	--	---	---

Penelitian yang kami lakukan, mempunyai tujuan penelitian dan alat analisis yang sama dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya selain pada lokasi atau daerah penelitian dan periode tahun analisis, yang berbeda juga untuk menentukan sektor prioritas dalam konteks otonomi daerah terdapat beberapa tambahan indikator yaitu: kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk menentukan klasifikasi sektor prioritas suatu daerah diperlukan analisis Skalogram (Skalling).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara

pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama mengambil inisiatif pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menakar potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999:109).

Dalam penerapan konsep daerah (regional) terdapat tiga konsep wilayah yang lazim digunakan yaitu, pertama *homogenius region*, kedua *nodal region*, ketiga *planning region* atau disebut juga *administrasi region* (Richardson, 1991:5). Dalam (Arsyad,1999:107) dijelaskan daerah homogen adalah suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial budaya, geografis, dan sebagainya. Daerah nodal adalah suatu daerah yang dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan daerah perencanaan atau daerah administrasi adalah daerah dengan suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu propinsi, kabupaten, kecamatan,dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara.

Pentingnya perencanaan regional bukan hanya untuk kepentingan daerah-daerah melainkan untuk kepentingan pembangunan nasional itu sendiri. Antara lain dikemukakan oleh Gunnar Myrdal bahwa perkembangan yang tidak merata dapat menimbulkan *backwash effects* yaitu menaikkan tenaga dan modal yang diperlukan kepada tempat yang mulai dibangun, sehingga daerah lain sekitar daerah itu menjadi mundur dan terbelakang. Segala tindakan pembangunan harus ditujukan untuk melaksanakan *Spread effects*, yaitu perluasan aktifitas dari pusat pembangunan ekonomi ke daerah lain (Tjokroamidjojo, 1993 :30).

2.2.2 Model Ekonomi Basis

Inti dari model ekonomi basis (*Economic Base Model*) adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja. Akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang yang tidak bergerak (*immobile*), seperti yang berhubungan dengan aspek geografi, iklim, peninggalan sejarah, daerah pariwisata dan sebagainya.

Kegiatan basis adalah kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain, sehingga sektor tersebut mempunyai nilai surplus dari kegiatan ekonomi dan akan menaikkan pendapatan daerah tersebut. Pengertian ekspor dalam hal ini adalah kemampuan suatu daerah untuk menyediakan produk yang dihasilkan oleh suatu sektor ke

daerah lain. Sektor basis ini akan menjadi sektor prioritas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Teori basis ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Tenaga kerja dan pendapatan pada sektor basis adalah fungsi permintaan dari luar (*exogenous*), yaitu permintaan dari luar yang mengakibatkan terjadinya ekspor dari wilayah tersebut. Disamping sektor basis, ada kegiatan-kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani pekerja dan keluarganya pada sektor basis dan kegiatan sektor basis itu sendiri. Kegiatan sektor pendukung seperti perdagangan dan pelayanan perorangan disebut sektor non basis.

Kedua sektor tersebut mempunyai hubungan dengan permintaan dari luar wilayah. Sektor basis berhubungan secara langsung sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung yaitu melalui sektor basis terlebih dahulu. Apabila permintaan dari luar meningkat maka sektor basis akan berkembang. Hal ini pada gilirannya akan mengembangkan sektor non basis. Teori ekonomi basis ini hanya mengklasifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Jadi tenaga kerja (pendapatan) sektor basis ditambah tenaga kerja (pendapatan) sektor non basis sama dengan total tenaga kerja (pendapatan) wilayah.

Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode yaitu: 1). metode pengukuran langsung; 2). metode pengukuran tidak langsung.

Metode pengukuran langsung dapat dengan survei langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. Metode ini dapat menentukan sektor basis dengan tepat. Akan tetapi metode ini memerlukan biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat hal tersebut diatas, maka sebagian besar pakar ekonomi wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung.

Beberapa metode pengukuran tidak langsung yaitu: 1). metode pendekatan asumsi; 2). metode *Location Quotient*; 3). metode kombinasi pendekatan asumsi dan *Location Quotient*; 4). metode kebutuhan minimum.

Melalui pendekatan asumsi yaitu bahwa semua sektor industri primer dan manufakturing adalah sektor basis. Sedangkan sektor jasa adalah sektor non basis. Pada wilayah tertentu yang luasnya relatif kecil dan tertutup, maka metode ini cukup baik bila digunakan. Akan tetapi pada banyak kasus, dalam suatu kelompok industri bisa merupakan sektor basis juga merupakan sektor non basis.

Metode *Location Quotient* (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor *i* pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) nasional. Asumsi metode LQ ini adalah bahwa penduduk di wilayah yang bersangkutan mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional, asumsi lainnya adalah bahwa permintaan wilayah akan

suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

Metode kombinasi antara pendekatan asumsi dengan pendekatan *Location Quotient* dikemukakan oleh Hoyt. Ia menyarankan bahwa ada beberapa aturan untuk membedakan sektor basis dengan sektor non basis, yaitu:

1. semua tenaga kerja dan pendapatan dari sektor (industri) ekstraktif adalah sektor basis;
2. semua tenaga kerja dan pendapatan dari sumber khusus seperti politik, pendidikan, kelembagaan, tempat istirahat, kegiatan hiburan dipertimbangkan sebagai sektor basis.

Metode kebutuhan minimum melibatkan penyeleksian sejumlah wilayah yang sama dengan wilayah yang diteliti. Dengan menggunakan distribusi minimum dari tenaga kerja regional dan bukan distribusi rata-rata. Untuk setiap wilayah pertama-tama dihitung persentase angkatan kerja yang dipekerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase itu dibandingkan dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kelainan dan persentase terkecil dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini digunakan sebagai batas dan semua tenaga kerja di wilayah-wilayah lain yang lebih tinggi dari persentase ini dianggap sebagai tenaga kerja basis. Proses ini diulangi untuk setiap industri di wilayah yang bersangkutan untuk memperoleh tenaga kerja basis total. Dibandingkan dengan metode LQ metode ini lebih bersifat arbiter karena sangat tergantung pada pemilihan persentase minimum dan tingkat disagregasi. Disagregasi yang terlalu terinci akan mengakibatkan bahwa hampir semua sektor merupakan sektor basis.

2.2.3 Location Quotient dan Dynamic Location Quotient

Dari keempat metode diatas Glasson (1978) menyarankan untuk menggunakan metode *Location Quotient* dalam menentukan apakah sektor tersebut basis atau tidak. Namun Hover (dalam Sugeng, 1989) menyarankan bahwa apabila menggunakan metode tersebut untuk memperkirakan berapa banyaknya output industri yang diekspor, maka perhitungan seyogyanya tidak didasarkan pendapatan perseorangan atau jumlah penduduk. Akan tetapi baik jika perhitungannya tersebut didasarkan pada dugaan statistik yang lebih menunjukkan permintaan atas industri tersebut. Sebagai contoh melalui jumlah nilai tambah (*value added*) dari industri atau sektor tersebut.

Dalam perencanaan regional terdapat banyak alat analisis untuk menentukan kegiatan atau memilih aktifitas ekonomi yang akan dikembangkan dalam suatu daerah dengan menggunakan analisis LQ. Analisis LQ merupakan salah satu metode tidak langsung untuk mengukur konsentrasi kegiatan ekonomi di sektor industri secara relatif berdasarkan nilai tambah bruto atau tenaga kerja.

Location Quotient (LQ) merupakan indeks yang membandingkan sumbangan dalam persen beberapa agregasi dasar. Rumus dari analisis LQ sebagai berikut (Azis, 1994:154):

$$LQR_i = \frac{VR_i / VR}{Vi / V}$$

Analisis LQ merupakan indikator yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan sektor atau sub sektor dalam suatu kegiatan ekonomi daerah. Jika suatu sektor atau sub sektor memiliki nilai LQ lebih dari satu maka sektor atau sub sektor tersebut merupakan sektor atau sub sektor yang potensial dan akan mengeksport produknya ke daerah yang lain atau dengan kata lain sektor atau sub sektor tersebut dapat dijadikan sektor pemimpin (*leading sector*) karena sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya jika suatu sektor atau sub sektor memiliki nilai LQ kurang dari satu maka sektor tersebut lemah, dengan kata lain daerah tersebut mengimpor produk dari sektor atau sub sektor tersebut.

Dalam teknik LQ ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1). kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industri basis; 2). kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut. Jenis ini dinamakan industri non basis atau industri lokal.

Glasson menyatakan bahwa bertambah banyaknya kegiatan sektor prioritas di dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah, menambah permintaan barang-barang dan jasa didalam kenaikan volume kegiatan sektor lain yang tidak termasuk dalam sektor yang tidak diprioritaskan dalam pembangunan, sebaliknya berkurangnya kegiatan sektor yang dijadikan prioritas pembangunan akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan sektor yang tidak dijadikan prioritas pembangunan.

Kegiatan sektor yang dijadikan prioritas pembangunan merupakan peranan penggerak pertama (*prime mover role*) dimana setiap perubahan merupakan tingkat pengganda pendapatan terhadap perekonomian regional (Glasson, 1990:64)

Dynamic Location Quotient merupakan alternatif bagi kelemahan LQ, yaitu tidak digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan. Prinsip DLQ masih sama dengan LQ, yaitu untuk mengintrodaksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t) (Yuwono, 1999:49).

Tafsiran atas DLQ pada dasarnya sama dengan LQ, kecuali perbandingannya lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Jika $DLQ = 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (n) sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB daerah himpunan. Jika $DLQ < 1$, berarti laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (n) lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor terhadap PDRB daerah himpunannya. Kondisi demikian menyatakan bahwa selama keadaan masih tetap sebagaimana adanya, maka pada masa depan sektor ini akan kalah bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain dalam daerah himpunannya. Sebaliknya jika $DLQ > 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap PDRB daerah (n) lebih cepat dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah himpunannya. Pada masa depan kalau keadaan masih tetap sebagaimana adanya saat ini maka dapat

diharapkan bahwa sektor ini akan unggul dalam persaingan. DLQ dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuwono, 1999:50):

$$DLQ = \left\{ \frac{(1 + g_{in})^t / (1 + g_n)^t}{(1 + G_i)^t / (1 + G)^t} \right\}$$

2.2.4 Koefisien Pergeseran (Coefisient Resuffle =CR)

Analisis koefisien pergeseran sebenarnya merupakan turunan dari analisis *Location Quotient*. Koefisien pergeseran (*Coefisient Resuffle*) merupakan alat analisis yang menunjukkan pergeseran sruktur suatu sektor atau sub sektor. Setiap sektor atau sub sektor akan mengalami pergeseran dalam kurun waktu tertentu. Untuk menentukan kecenderungan kekuatan suatu sektor atau sub sektor tertentu digunakan analisis pergeseran yaitu analisis koefisien pergeseran (Warpani, 1984:85). Rumusnya sebagai berikut:

$$CR = \frac{\%(VR_i / VR_{99} - VR_i / VR_{96}) - \%(V_i / V_{99} - V_i / V_{96})}{100}$$

Jika suatu sektor memiliki nilai CR lebih dari nol maka sektor atau sub sektor ini bergeser, sehingga sektor atau sub sektor ini memberikan nilai yang lebih besar pada kegiatan ekonomi suatu daerah dan mengalami kecenderungan pergeseran yang lebih kuat dibandingkan sektor atau sub sektor yang lainnya. Sebaliknya jika sektor atau sub sektor memiliki nilai kurang dari nol maka sektor atau sub sektor tersebut mengalami pergeseran yang semakin

melemah sehingga kurang memberikan nilai yang lebih besar pada kegiatan di sektor ekonomi.

2.2.5 Analisis Skalogram (skalling)

Untuk menentukan sektor atau sub sektor prioritas yang akan dikembangkan lebih lanjut dari kelompok sektor prioritas yang ada dapat digunakan analisis Skalling. Skalling dimaksudkan untuk menentukan prioritas melalui perangkingan terhadap komponen sektor atau sub sektor yang ada pada satu kabupaten. Adapun rumus Skalling adalah (Budiharsono, 1989:337).

$$Skalling = \frac{N - N \text{ min}}{N \text{ max} - N \text{ min}} \times 100$$

2.2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Otonomi daerah adalah suatu upaya pemberdayaan daerah artinya daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan pemanfaatan atas potensinya berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan yang mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya sendiri. Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak dapat lepas dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) adalah anggaran yang disusun untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas daerah yang menggambarkan bagaimana memperoleh, mengatur membelanjakan serta mengolah keuangan yang ada agar

dapat mencapai tujuan. Penyelenggaraan pemerintah daerah berlandaskan desentralisasi yang memberi kewenangan terhadap daerah untuk merencanakan, melaksanakan, membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah, dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut pasal 79 Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang “Keuangan Daerah” dan pasal 3 Undang-Undang no 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”, sumber pendapatan daerah dibedakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

- a) hasil pajak daerah
- b) hasil retribusi daerah
- c) hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) lain-lain pendapatan yang sah;

2. Dana Perimbangan

3. Pinjaman Daerah

4. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selain dana tersebut diatas, terdapat dana Perimbangan daerah yaitu:

- 1) Bagian daerah dari Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya lain.
- 2) Dana Alokasi Umum
- 3) Dana Alokasi Khusus

Sumber-sumber pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai tugas-tugas otonomi daerah yang ditetapkan berdasar

pada peraturan daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (UU no 22 tahun 1999, pasal 78).

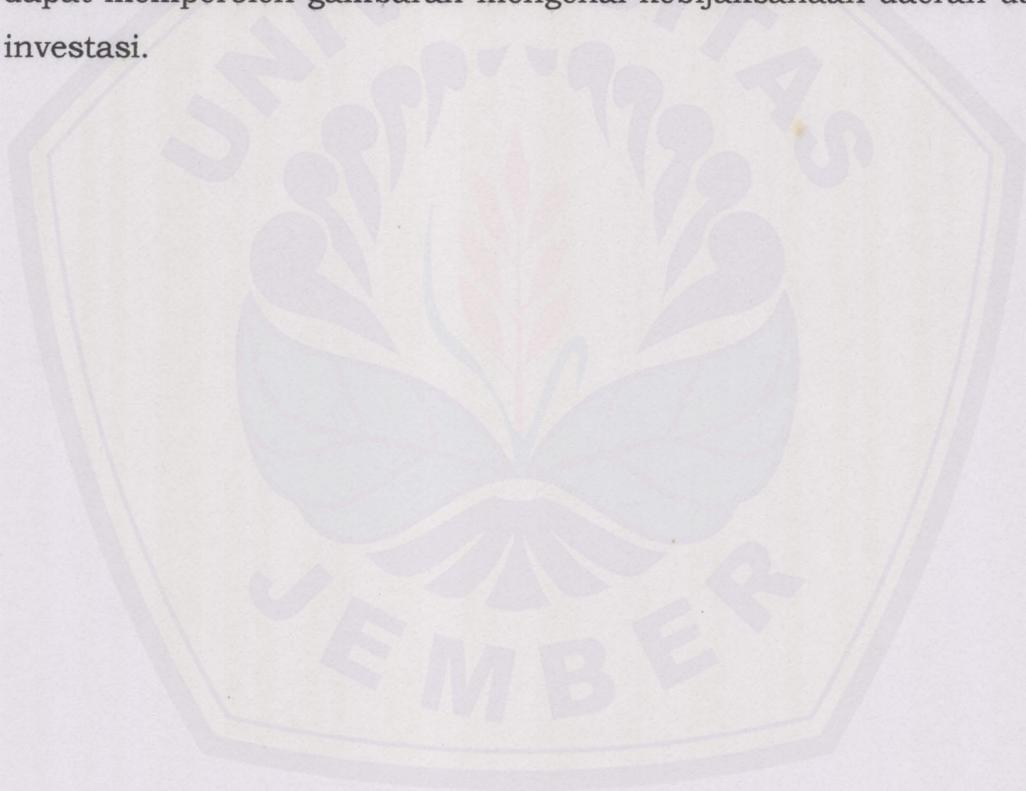
2.2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

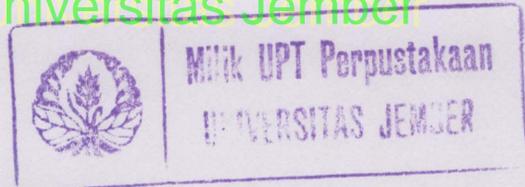
Nilai tambah yang dihitung dari seluruh sektor ekonomi yang terdapat di suatu daerah apabila dijumlahkan akan membentuk PDRB. Keadaan perekonomian suatu daerah secara keseluruhan tercermin dalam Produk domestik Regional Bruto yang mempunyai arti total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Hal ini menunjukkan besarnya nilai tambah dari produksi yang dihasilkan dari berbagai sektor yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tanpa memperhatikan faktor produksi yang dipakai. Perhitungan PDRB mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- 1). untuk mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu daerah. Artinya dari perhitungan PDRB dapat diketahui struktur perekonomian suatu daerah, arah perekonomian dimasa yang akan datang sehingga mampu memberikan kesimpulan yang benar;
- 2). membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Artinya dalam menghitung PDRB jangka waktu yang dicatat merupakan penjualan angka-angka selama jangka waktu satu tahun, sehingga dapat membandingkan dari tahun ke tahun. Perbandingan ini dapat memberikan keterangan terjadinya perubahan struktur ekonomi atau tidak. Angka perbandingan ini dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dan melaksanakan program pembangunan berikutnya;
- 3). membandingkan perekonomian antar daerah. Perhitungan Perbandingan ini dapat digunakan pemerintah untuk mengambil

kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerah dengan daerah lain. Pembagian ini penting bagi suatu daerah karena dapat diketahui tingkat kemajuan daerah;

- 4).merumuskan kebijaksanaan pemerintah. Perhitungan PDRB dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pertumbuhan yang ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan komposisinya pada tiap-tiap sektor ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan perkapita pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebijaksanaan daerah dan investasi.





III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan merupakan Penelitian Deskriptif (*Deskriptif reserch*) dan Eksploratif yaitu penelitian yang bermaksud membuat diskripsi kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan alat analisis sektor prioritas berdasarkan indikator yaitu *Location Quetient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* dan dirangking dengan analisis *Skalling (Skalogram)* untuk mengetahui sektor atau sub sektor yang akan dikembangkan menjadi sektor prioritas pembangunan dan analisis pergeseran struktur dengan menggunakan *Coefisien Resuffle (CR)* untuk mengetahui sektor atau sub sektor yang memiliki kecenderungan menguat di masa yang akan datang.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan yaitu perilaku aktifitas sembilan sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peranannya terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lamongan.

3.2 Lokasi Penelitian dan waktu

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang memberikan sumbangan terhadap perekonomian Jawa Timur, dan merupakan salah satu daerah satuan pengembangan wilayah (SWP) Jawa timur.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan diperoleh dengan mencatat data yang dikumpulkan oleh instansi yang bersangkutan antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan secara berkala atau data time series selama periode 1993-1999.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Sektor Prioritas

Untuk mengetahui sektor prioritas di Kabupaten Lamongan digunakan empat indikator yaitu model analisis LQ (basis), model analisis DLQ (LQ dinamis), koefisien pergeseran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena pada masing-masing indikator tersebut terdapat sembilan sektor selama tujuh tahun, untuk itu digunakan analisis skalling guna menentukan sektor yang mempunyai indikator LQ, DLQ, koefisien pergeseran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi.

Setelah keempat indikator tersebut diketahui yang paling tinggi untuk keputusan mana sektor prioritas, maka keempat indikator tersebut juga digabung untuk mengetahui sektor mana yang paling tinggi rangkingnya dan disebut sektor prioritas. Dalam hal ini menggunakan analisis skalling (skalogram).

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk mengetahui sektor prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan digunakan analisis LQ (Location Quotient) masing-masing sektor (Azis, 1994:154).

$$LQR_i = \frac{VR_i / VR}{Vi / V}$$

Keterangan

LQR_i = indeks LQ dari sektor/sub sektor i di Kabupaten Lamongan

V_{ri} = value added sektor/sub sektor i di Kabupaten Lamongan

VR = jumlah semua value added sektor/sub sektor i di Kabupaten Lamongan.

V_i = value added sektor/sub sektor i di Jawa Timur

V = jumlah semua value added sektor/sub sektor di Jawa Timur

Kriteria yang digunakan

LQ > 1, menyatakan bahwa sektor atau sub sektor tersebut merupakan sektor basis dan memiliki keunggulan komparatif dan dapat dijadikan leading sektor (sektor pemimpin) dan diunggulkan dalam wilayah pembangunan .

$LQ < 1$, menyatakan bahwa sektor /sub sektor i tersebut bukan sektor basis dan tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga kurang diunggulkan

$LQ=1$, menyatakan bahwa sektor atau sub sektor i tersebut dapat mencukupi kebutuhan wilayah tersebut (swasembada).

2. Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Sebagai alternatif melengkapi kelemahan analisis LQ maka digunakan metode DLQ. Metode ini digunakan karena dapat memberikan hasil yang lebih tepat dengan mengacu pada laju pertumbuhan sektor. DLQ dirumuskan sebagai berikut (Yuwono,1999:50):

$$DLQ = \left\{ \frac{(1 + g_{in})^t / (1 + g_n)^t}{(1 + G_i)^t / (1 + G)^t} \right\}$$

Keterangan:

g_{in} = laju pertumbuhan sektor (i) di daerah (n)

G_i = laju pertumbuhan sektor (i) di daerah himpunan

g_n = rata-rata laju pertumbuhan daerah (n)

G = rata-rata laju pertumbuhan daerah himpunan

Kriteria yang digunakan:

$DLQ > 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap PDRB daerah (n) lebih cepat bila dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah himpunannya.

DLQ <1, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah lebih lambat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor terhadap daerah himpunannya.

DLQ =1, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor terhadap daerah himpunannya.

Untuk menghitung rata-rata laju pertumbuhan digunakan rumus (soebardi dkk, 1998:74)

$$g = \left(\sqrt[n]{P_n / P_{1-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

g = rata-rata laju pertumbuhan

P₁ = PDRB tahun awal periode (1996)

P_n = PDRB tahun akhir periode (1999)

n = jumlah tahun analisis (empat tahun)

Untuk mengetahui sektor atau sub sektor prioritas dipakai sebagai pertimbangannya adalah nilai-nilai berbagai indikator antara lain : LQ, DLQ, koefisien Pergeseran (CR) dan PAD. Dalam hal ini penentuan rangking dengan banyak indikator tersebut dipakai analisis Skalogram (Skalling). Rumus analisis Skalling adalah (Budiharsono,1989:337)

$$Skaling = \frac{N - N \text{ min}}{N \text{ max} - N \text{ min}} \times 100$$

Keterangan :

- N = nilai pada Location Quetient atau Elastisitas Kesempatan Kerja analisa
- N min = nilai minimal diantara Location Quetient atau Elastisitas Kesempatan Kerja
- N max = nilai maksimal diantara Location Quetient atau Elastisitas Kesempatan Kerja

3.4.2 Analisis Kekuatan Pergeseran Struktur Ekonomi

Untuk mengetahui adanya pergeseran struktur dalam sektor atau sub sektor di Kabupaten Lamongan digunakan koefisien pergeseran (Coefisien Resuffle), (Warpani, 1984:85:

$$CR = \frac{\%(VRi / VR99 - VRi / VR96) - \%(Vi / V99 - Vi / V96)}{100}$$

Keterangan :

- CR < 0, berarti sektor atau sub sektor i tidak mengalami pergeseran pada kegiatan ekonomi
- CR > 0, berarti sektor atau sub sektor i mengalami pergeseran pada kegiatan ekonomi
- CR = 0, berarti sektor atau sub sektor i memberikan nilai yang tetap pada kegiatan ekonomi atau tidak mengalami pergeseran
- CR = 1, berarti sektor atau sub sektor i mengalami pergeseran dan menambah nilai yang lebih tinggi pada kegiatan ekonomi.

3.5 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Untuk memperjelas pengertian masalah yang dibahas dalam penulisan ini maka digunakan batasan-batasan sebagai berikut :

1. value added adalah nilai tambah pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses sebagai input antara dalam satuan rupiah per tahun;
2. produk domestik regional bruto adalah jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha, yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Lamongan tanpa memperhatikan pemilihan atas faktor produksi dalam satuan rupiah per tahun;
3. pertumbuhan ekonomi dalam hal ini diwakili PDRB adalah penambahan jumlah barang dan jasa satuan persen per tahun;
4. pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dalam satuan rupiah per tahun.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Keadaan dan Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan terletak diantara $6^{\circ}51'054''$ - $7^{\circ}23'16''$ lintang selatan dan $112^{\circ}4'14''$ - $112^{\circ}35'145''$ bujur timur. Kabupaten Lamongan memiliki wilayah dengan ketinggian rata-rata di atas permukaan laut adalah setinggi 0-7 meter, dengan kemiringan sekitar 0-5% dan memiliki wilayah yang cenderung landai. Wilayah bagian utara dan selatan merupakan pegunungan kapur dan berbatu, sedangkan wilayah tengah bagian utara (sepanjang bengawan solo) adalah genangan air (bonorowo). Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Jombang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah sebesar 1.669,55 km² yang terdiri dari tanah sawah seluas 86.348 Ha, pekarangan/halaman seluas 13.051 Ha, tegal atau kebun seluas 28.222 Ha, hutan negara 29.931 Ha, dan lainnya seluas 9.403 Ha.

4.1.2 Kependudukan

4.1.2.1 Keadaan Penduduk

Berdasarkan registrasi akhir tahun 2000, penduduk yang mendiami Kabupaten Lamongan mencapai 1.200.151 jiwa, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Jika diketahui pada tahun 1999 jumlah penduduknya sekitar 1.193.644

jiwa. Sebagaimana terdapat pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lamongan Tahun 1996-2000 (jiwa/km²).

Tahun	Penduduk (jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan (jiwa /Km ²)	Laju Pertumbuhan (%)
1996	1.180.847	1.669,55	707,3	-
1997	1.184.994	1.669,55	710,3	0,43
1998	1.189.644	1.669,55	712,2	0,25
1999	1.193.644	1.669,55	714,9	0,38
2000	1.200.051	1.669,55	718,8	0,53

Sumber :BPS Kabupaten Lamongan 1999, diolah

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan penduduk tertinggi dicapai pada tahun 2000 yaitu sebesar 0,53%.

4.1.2.2 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk di Kabupaten Lamongan menurut tingkat pendidikannya dapat diketahui melalui tabel 3:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2000 (jiwa)

Tingkat Pendidikan	Jiwa	Persentase
Tidak / belum pernah sekolah	165.826	16,64
Tidak / belum tamat SD	214.635	21,53
Tamat SD	329.014	33,00
Tamat SMP	167.193	16,77
Tamat SMU	110.717	11,10
Tamat Akademi / Diploma	2.165	0,22
Tamat Sarjana	7.459	0,75
Jumlah	997.009	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan 1999, diolah

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2000 persentase penduduk di Kabupaten Lamongan yaitu sebesar 33,00% telah menamatkan sekolah dasar, sedangkan yang tidak atau belum pernah sekolah sebesar 16,63%. Angka ini dapat diartikan telah terjadi adanya suatu kemajuan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Lamongan telah mempunyai kesempatan menikmati pendidikan dasar.

Penduduk di Kabupaten Lamongan yang telah menamatkan pendidikan tinggi atau akademi diyakini oleh masyarakat sebagai sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Lamongan, akan tetapi jumlahnya tergolong masih kecil yaitu sebesar 0,22% untuk penduduk yang tamat akademi/diploma dan sebesar 0,75% untuk penduduk yang menamatkan pendidikan sarjana.

4.1.2.3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Distribusi penduduk Kabupaten Lamongan menurut pendidikan tinggi yang bekerja di sektor – sektor ekonomi dapat dilihat dalam tabel 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Lamongan pada tahun 2000 yaitu sebesar 57,01% berada di sektor pertanian, sedangkan pada sektor lain-lain menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 29,74%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan ketiga dengan persentase sebesar 10,31%.

Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2000 sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kemampuan menyediakan kesempatan kerja terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Selanjutnya sektor jasa-jasa merupakan sektor usaha yang hanya

mampu menyediakan kesempatan kerja terkecil yaitu sebesar 0,65% (lihat tabel 4)

Tabel 4. Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamongan Tahun 2000 (jiwa)

Sektor Ekonomi	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1. Pertanian	250.651	57,04
2. Industri Pengolahan	9.880	2,25
3. Perdagangan, Hotel dan Restoran	45.335	10,32
4. Jasa-Jasa	2.866	0,65
5. lainnya	130.705	29,74
Jumlah	439.437	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 1999, diolah

4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang kenaikan itu lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk atau terjadi perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun (Arsyad, 1997:11). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah digunakan PDRB. Jika suatu sektor mempunyai peranan yang dominan, akan tetapi memiliki pertumbuhan yang lambat, maka akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka sektor tersebut secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (BPS Kabupaten Lamongan, 1999:3).

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 1993 dapat dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tahun 1993-1999 yaitu berturut-turut sebesar 4,51%, 6,52%, 6,76%,

4,64%, -5,10%, dan 2,12%. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan tingkat kegiatan ekonomi baik secara keseluruhan maupun per sektor. Untuk tahun 1998 Kabupaten Lamongan mengalami pertumbuhan minus yaitu sebesar 5,10 % yang merupakan pertumbuhan ekonomi terendah selama empat tahun terakhir, yang terjadi karena adanya dampak dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia, yang mengakibatkan masing-masing sektor ekonomi mengalami penurunan output yang cukup tajam. Pada tahun 1998 sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang cukup besar berturut-turut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, angkutan dan komunikasi, jasa-jasa, bangunan, listrik gas dan air bersih masing-masing sebesar -18,31%, -12,28%, -7,48%, -7,14%, -4,71%, -0,49%.

Sektor yang masih mengalami pertumbuhan positif adalah sektor pertanian, sebesar 2,08%, sektor pertambangan dan penggalan sebesar 4,36%. Namun tingkat pertumbuhan ini jauh lebih rendah bila dibandingkan tingkat pertumbuhan di tahun 1997 dimana untuk sektor pertanian sebesar 6,63%, sektor pertambangan dan penggalan sebesar 5,26%, sedangkan untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah satu-satunya sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 4,89 (tabel 5).

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Lamongan Tahun 1994-1999 ADHK 1993 (dalam persen)

No	Sektor Ekonomi	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1.	Pertanian	0,59	4,43	-2,30	6,63	2,08	2,72
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,56	2,41	9,90	5,26	4,36	6,46
3.	Industri Pengolahan	20,35	11,52	36,54	3,15	-12,28	0,82
4.	Listrik Gas dan Air Bersih	7,90	9,47	11,45	7,45	-0,49	4,42
5.	Bangunan	6,00	11,56	2,49	8,40	-4,71	3,60
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,47	4,00	10,03	2,90	-18,31	1,11
7.	Angkutan dan Komunikasi	5,56	7,09	19,36	7,22	-7,48	4,47
8.	Keuangan, Persew Dan Jasa Perusahaan	4,57	6,76	10,89	1,92	3,39	1,85
9.	Jasa-Jasa	16,35	12,77	15,15	1,87	-7,18	1,22
Total PDRB		4,51	6,52	6,76	4,64	-5,10	2,12

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, 1999

Selama kurun waktu 1994-1999 sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 7,56%, 2,41%, 9,90%, 5,26%, 4,36%, 6,46%. Besarnya pertumbuhan sektor ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah Jawa Timur atau daerah himpunannya. Pada sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 1997 pertumbuhannya cukup besar yaitu 6,63% tapi pada dua tahun terakhir mengalami penurunan yang cenderung konstan yaitu

masing-masing sebesar 2,08% pada tahun 1998 dan 2,72% pada tahun 1999.

4.1.4 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program-program pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah tersebut dalam segala sektor, baik dilihat dari tingkat kemakmuran regional, peranan sektor yang dimiliki daerah tersebut (BPS Kabupaten Lamongan, 1997:30).

Terdapat tiga sektor utama yang paling berpengaruh terhadap total PDRB Kabupaten Lamongan yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Sumbangan terbesar adalah sektor pertanian, dimana pada tahun 1999 sumbangan yang diberikan sebesar Rp. 507.410,50 juta atau sebesar 46,40%. Hal ini disebabkan karena terdapat areal pertanian yang sangat luas sehingga alokasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun modal, banyak diberikan pada sektor ini agar mengalami peningkatan produksi, sumbangan berikutnya diberikan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp.182.648,40 juta atau sebesar 16,70%, dan sektor jasa-jasa yang memberikan sumbangan sebesar Rp. 176.492,96 juta atau 16,13%. Sumbangan terkecil diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik gas dan air bersih masing-masing sebesar Rp. 2.200,06 juta dan Rp. 4.740,12 juta atau 0,20% dan 0,43% (lihat tabel 6).

Tabel 6. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 ADHK 1993 (dalam juta rupiah)

No	Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999
1.	Pertanian	453.839,97	483.920,14	493.997,31	507.410,50
2.	Pertambangan & Penggalian	1.881,27	1.980,27	2.066,64	2.200,06
3.	Industri Pengolahan	85.412,95	88.101,68	77.282,23	77.915,86
4.	Listrik Gas dan Air Bersih	4.245,53	4.561,89	4.539,42	4.740,12
5.	Bangunan	46.513,99	50.423,17	48.048,05	49.778,40
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	214.901,91	221.131,53	180.637,25	182.6498,40
7.	Angkutan dan Komunikasi	30.408,09	32.602,64	30.162,47	31.511,93
8.	Keua,Persew &Jasa Perush	56.947,11	58.038,47	60.003,45	61.116,03
9.	Jasa-Jasa	184.420,63	187.861,90	174.367,98	176.492,96
	Jumlah	1.078.571,45	1.128.621,69	1.071.104,80	1.093.814,26

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, 1999

4.1.5 Struktur Perekonomian Kabupaten Lamongan

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan kegiatan ekonomi kedalam tiga sektor, masing-masing sektor tersebut adalah pertama sektor primer (*agriculture*), adalah kegiatan ekonomi yang membudidayakan sumberdaya alam secara langsung, tanpa adanya proses pengolahan, yaitu meliputi kegiatan pertanian, dan pertambangan dan penggalian. Kedua adalah sektor sekunder (*manufacture*), yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah sumberdaya alam menjadi barang jadi atau setengah jadi, yang termasuk dalam kategori sektor ini adalah sektor industri

pengolahan, listrik gas dan air bersih, dan sektor bangunan. Ketiga adalah sektor tersier (*service*) yaitu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang tapi jasa, yaitu meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa (BPS Kabupaten Lamongan, 1997:32).

Struktur perekonomian Kabupaten Lamongan didominasi oleh dua sektor yaitu sektor primer dan sektor tersier dengan nilai proporsi lebih dari 40%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan pada sektor ini melebihi sektor lain (lihat tabel 7).

Tabel 7. Struktur Perekonomian Kabupaten Lamongan tahun 1996-1999 ADHK 1993 (dalam persen).

No	Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999
1.	Primer	42,25	43,05	46,31	46,60
2.	Sekunder	12,63	12,68	12,13	12,00
3.	Tersier	45,12	44,27	41,56	41,40

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, diolah.

Pada tabel diatas sumbangan sektor primer, sekunder, dan tersier pada tahun 1998 dan 1999 cenderung konstan yaitu berturut-turut sebesar 46,31%, 12,13%, dan 41,56% pada tahun 1998 dan 46,60%, 12,00% dan 41,40% pada tahun 1999. Hal ini dapat diartikan pada dua tahun terakhir kegiatan ekonomi yang terjadi mengalami stagnasi sehingga tidak terjadi peningkatan nilai persentase pada perekonomian Kabupaten Lamongan.

4.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat lepas dari kemampuan daerah dalam bidang kemampuan keuangan.

Hal ini merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, yang dapat diartikan daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri dan cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerahnya. Guna membiayai penyelenggaraan tugas – tugas pemerintah daerah, maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menggambarkan bagaimana memperoleh, mengatur, membelanjakan serta mengolah keuangan daerah agar dapat mencapai tujuan pembangunan suatu daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang berlandaskan desentralisasi memberi kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan dan membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah diharapkan mampu menghimpun dana dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, sehingga tidak hanya menggantungkan pemberian pemerintah pusat. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus minimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan yang terbesar dan didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah. Sumbangan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Periode 2000 – 2001 (dalam persen)

No	Sektor ekonomi	Prosentase PAD		Perkemb (%)
		2000	2001	
1	Pertanian	0,40	6,07	155,34
2	Pertambangan dan penggalian	0,78	6,78	45,92
3	Industri pengolahan	0,39	3,26	40,03
4	Listrik, gas dan air bersih	41,32	368,20	50,69
5	Bangunan	1,98	18,48	57,84
6	Perdagangan, hotel dan restoran	11,33	110,44	64,87
7	Pengangkutan dan komunikasi	5,31	50,43	60,55
8	Keuangan, persew dan jasa perush	10,14	119,37	99,00
9	Jasa – jasa	28,32	301,55	80,07

Sumber data : BPS Kabupaten Lamongan, diolah

Pada tabel di atas yaitu pada tahun 2000 terdapat dua sektor ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan yaitu sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor jasa-jasa yaitu masing-masing sebesar 41,32% dan 28,33%. Sektor-sektor yang mengalami perkembangan dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu masing-masing pertanian, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa. Untuk sektor-sektor yang lain sumbangan yang diberikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang berarti.

4.2 Analisis

4.2.1 Diskripsi Hasil Penelitian

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama mengelola

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan mempergunakan potensi sumberdaya tersebut untuk pembangunan suatu daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, diperlukan pertimbangan dan pemilihan yang tepat dari sektor-sektor yang harus prioritaskan agar dapat menjamin kelancaran pembangunan. Mengingat adanya keterbatasan sumberdaya dan modal pembangunan yang harus dialokasikan, maka penetapan sektor prioritas sangat diperlukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB Kabupaten Lamongan tahun 1993-1999 atas dasar harga kostan 1993 yang dihitung sejalan dengan perhitungan PDRB Jawa Timur dan PDB Nasional. Hal ini menyebabkan banyaknya lapangan usaha yang menjadi cakupan dalam perhitungan PDRB berubah dari 11 lapangan usaha (tahun 1983) menjadi 9 lapangan usaha pada penghitungan dengan tahun dasar 1993 (BPS Kabupaten Lamongan, 1998:33).

PDRB Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 1993-1999 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 907.575,68 juta di tahun 1993 menjadi Rp. 1.118.893,29 juta di tahun 1999. Krisis ekonomi yang terjadi sejak juli 1997 berdampak pula pada pertumbuhan PDRB riil Kabupaten Lamongan yang minus 5,10%, namun krisis tersebut sudah berangsur pulih. Recovery ekonomi yang dilaksanakan pemerintah telah menampakkan hasil nyata yaitu pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada nilai positif sebesar 2,12 pada tahun 1999.

Selama kurun waktu 1993-1999 sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan peranan paling dominan dengan rata-rata kontribusi sebesar 45,42%. Pada tahun 1993 kontibusi sektor ini sebesar 49,31%, dan mengalami penurunan kontribusi

secara berturut-turut pada tahun 1994 dan 1995 sebesar 45,18%, dan 45,98%. Pada tahun 1996 terjadi penurunan yang tajam yaitu dari 42,07% dan pada tahun 1997 menjadi 42,88%. Pada tahun 1998 dan tahun 1999 terjadi peningkatan kembali sebesar 46,12% pada tahun 1998 dan 46,40% pada tahun 1999. Sektor ini masih memegang prioritas dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Lamongan karena peranan strategisnya terhadap pembangunan ekonomi masih cukup besar. Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa (lihat tabel 9).

Tabel 9. Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha 1993-1999 ADHK 1993 (dalam persen)

No	Sektor Ekonomi	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1.	Pertanian	49,31	45,18	45,98	42,07	42,88	46,12	46,40
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,19	0,20
3.	Industri Pengolahan	5,13	5,70	6,19	7,92	7,81	7,22	7,12
4.	Listrik Gas dan Air Bersih	0,36	0,35	0,38	0,40	0,40	0,42	0,43
5.	Bangunan	4,23	4,13	4,49	4,31	4,47	4,49	4,45
6.	Perdagangan, Hotel dan Restn	19,80	19,07	19,33	19,92	19,95	16,86	16,70
7.	Angkutan dan Komunikasi	2,48	2,42	2,52	2,82	2,89	2,82	2,88
8.	Keu,Persew Dan Jasa Perush	5,07	4,88	5,08	5,27	5,14	5,60	5,59
9.	Jasa-Jasa	13,45	14,43	15,85	17,11	16,65	16,28	16,13
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, 1999

Sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang memberikan kontribusi sektoral terbesar dari tahun ke tahun. Selama empat tahun yaitu tahun 1993-1997 rata-rata kontribusi sektornya sebesar 19,00%. Pada tahun 1998 dan 1999 terjadi penurunan menjadi sebesar 16,86% dan 16,70%. Sektor jasa-jasa mengalami peningkatan yang konstan selama empat tahun, yaitu pada tahun 1993-1996 memiliki nilai kontribusi berturut-turut sebesar 13,45%, 14,43%, 15,85%, 17,11%, dan mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir dengan nilai kontribusi berturut-turut sebesar 16,65%, 16,28%, dan 16,13%.

Kontribusi terkecil diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata sumbangan sektoral sebesar 0,17% pertahun. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekonomi di sektor ini sangat sedikit dan Kabupaten Lamongan bukan merupakan daerah penghasil tambang karena sumbangan yang diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian hanya berasal dari sub sektor penggalian.

Data lain yang dipergunakan untuk menganalisis sektor basis yang akan dijadikan sebagai sektor prioritas adalah nilai tambah bruto tiap sektor yang terhimpun dalam PDRB Propinsi Jawa Timur pada tahun 1993-1999 ADHK 1993 yang dapat dilihat pada lampiran 6. Selama kurun waktu tahun 1993-1999 PDRB Jatim mengalami peningkatan dari Rp. 49.172.247,49 juta menjadi Rp. 55.038.126,58 juta (lihat tabel 10).

Tabel 10. Kontribusi Sektoral PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Jatim Tahun 1993-1999 ADHK 1993 (dalam persen)

No	Sektor Ekonomi	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1.	Pertanian	19,66	18,33	17,29	16,60	15,98	18,09	18,18
2.	Pertamb dan Penggalian	1,95	1,81	1,71	1,59	1,35	0,92	0,87
3.	Industri Pengolahan	25,18	26,54	27,71	28,66	29,93	27,76	27,37
4.	Listrik Gas dan Air Bersih	1,45	1,49	1,77	1,85	1,76	2,17	2,42
5.	Bangunan	6,21	6,51	6,75	6,87	69,74	5,36	4,85
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,37	20,69	20,81	21,04	21,32	20,90	21,30
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,64	6,65	6,66	6,74	6,53	7,45	8,07
8.	Keu,Persew dan Jasa Perusahaan	6,86	6,76	6,61	6,44	6,39	6,06	5,64
9.	Jasa-Jasa	11,68	11,22	10,69	10,20	9,99	11,28	11,29
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Jawa Timur, 1999

Tabel 10 menunjukkan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Jawa Timur selama kurun waktu 1993-1999 adalah industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, dimana sumbangan rata-rata masing-masing sektor berturut-turut adalah sebesar 25,08%, 20,92%, dan 17,73%.

4.2.2 Analisis Location Quotient (LQ)

Inti dari model ekonomi basis (*economic base model*) adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Sektor yang dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan selebihnya diekspor ke daerah lain disebut sektor basis, yang

nantinya akan dapat dijadikan sebagai sektor prioritas. Sektor basis ini harus mendapat perhatian untuk dapat dikembangkan lebih lanjut karena sektor basis sangat berpotensi dalam meningkatkan pembangunan suatu wilayah.

Untuk mengetahui sektor basis yang terdapat di suatu wilayah digunakan analisis LQ, yaitu analisis yang merupakan suatu indikator sederhana yang menunjukkan besar kecilnya peranan suatu sektor atau sub sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan suatu sektor di daerah lain. Jika suatu sektor memiliki nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan suatu sektor yang kuat, sehingga secara potensial merupakan pengeksport produksi dari sektor atau sub sektor ke daerah lain, sebaliknya jika suatu sektor memiliki nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut lemah dengan kata lain daerah tersebut menjadi pengimpor produk dari sektor atau sub sektor tersebut dari daerah lain.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ masing-masing sektor atau sub sektor pada PDRB tahun 1996-1999 yang ditunjukkan pada lampiran 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 terdapat dua sektor ekonomi yang merupakan sektor basis yaitu sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa (lihat tabel 11).

(1) Sektor Pertanian

Hasil perhitungan LQ menunjukkan selama kurun waktu 1996-1999 sektor pertanian mempunyai nilai LQ paling besar sehingga dapat dijadikan sebagai sektor basis selama empat tahun. Hal ini tidak lepas dari peranan setiap sektor tersebut dalam mendukung peningkatan sektor tersebut. Peranan sub sektor pertanian dapat dilihat dalam tabel 12.

Tabel 12. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 ADHK 1993

NO	SUB SEKTOR	1996	1997	1998	1999
1.	Tanaman bahan makanan	3,0291	3,2623	2,8965	2,8289
2.	Tanaman Perkebunan	0,3657	0,4994	0,3294	0,3375
3.	Peternakan & Hasil-hasilnya	0,8821	0,9435	0,8063	0,8119
4.	Kehutanan	0,2543	0,2072	0,4078	0,4298
5.	Perikanan	7,15124	7,2423	6,8157	7,6773

Sumber : lampiran 14, 15, 16, 17 diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sub sektor yang memberikan sumbangan terbesar yaitu sub sektor tanaman bahan makanan dan perikanan, yang terbukti nilai LQ lebih dari satu. Sub sektor tanaman bahan makanan pada tahun 1996 dan 1997 mengalami kenaikan dari 3,0291 menjadi 3,2623 tetapi pada tahun 1998-1999 terjadi penurunan yaitu sebesar 2,8965 dan 2,8289. Untuk sub sektor perikanan perolehan nilai LQ paling besar yaitu 7,1512 pada tahun 1996 dan mengalami peningkatan pada tahun 1997 sebesar 7,2423. Sub sektor ini mengalami penurunan pada tahun 1998 menjadi 6,8157 dan mengalami kenaikan yang cukup pesat pada tahun 1999 yaitu sebesar 7,6773. Sub sektor ini mencakup komoditi semua hasil dari kegiatan perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah dan keramba serta pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman ikan).

Sub sektor yang lain seperti tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, dan sub sektor kehutanan belum memberikan sumbangan yang berarti karena hanya memiliki nilai LQ kurang dari satu. Untuk memenuhi kebutuhan, sub sektor ini mendatangkan dari sub sektor daerah lain.

(2) Sektor Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa adalah sektor yang memiliki nilai LQ yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1996-1999 nilai LQ berturut-turut mengalami penurunan dari 1,6754 tahun 1996 menjadi 1,6650 pada tahun 1997. Pada tahun 1998 nilai LQnya sebesar 1,4427 dan 1,4293 pada tahun 1999. Sub sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sub sektor pemerintahan umum dan swasta yang meliputi jasa sosial dan kemasyarakatan, yang memiliki nilai LQ lebih dari satu.

Sumbangan sub sektor pemerintahan umum terhadap PDRB terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Untuk sub sektor swasta yang meliputi jasa hiburan dan kebudayaan, dan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga belum memberikan sumbangan yang berarti bagi PDRB Kabupaten Lamongan (lihat tabel 13).

Tabel 13 Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 ADHK 1993

NO	SUB SEKTOR	1996	1997	1998	1999
1	Pemerintahan Umum	2,1126	2,0635	1,9061	1,9353
2	Swasta	1,9314	1,3317	1,0337	1,0035
	1. Jasa sosial kemasyarakatan	2,7081	2,5826	1,8425	1,8474
	2. Jasa hiburan dan kebudayaan	0,3766	0,4062	0,4108	0,3931
	3. Jasa Perorangan dan rumah tangga	0,9475	0,9661	0,8348	0,8012

Sumber : 14, 15, 16, 17 diolah

4.2.3 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Berdasarkan perhitungan DLQ dapat diketahui bahwa sektor yang masih tetap dapat diprioritaskan untuk masa yang akan datang adalah sektor pertambangan dan penggalan, bangunan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa.. Sektor pertanian memiliki nilai DLQ kurang dari satu, hal ini dapat diartikan di masa mendatang sektor ini tidak dapat mencukupi kebutuhan wilayahnya atau kalah bersaing dengan sektor yang sama di wilayah himpunannya. Dapat diartikan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan lebih lambat dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Propinsi Jawa Timur. Kondisi ini akan mengakibatkan bahwa selama keadaan ini masih tetap sebagaimana adanya, maka pada masa mendatang sektor tersebut akan kalah bersaing.

Sektor pertambangan dan penggalan memiliki nilai DLQ paling besar, yaitu sebesar 3,06 yang berarti di masa yang akan datang sektor ini merupakan sektor basis dan dapat dijadikan sebagai sektor prioritas pembangunan. Keberhasilan sektor pertambangan dan penggalan ini tidak terlepas dari sumbangan sub sektor penggalan, yang merupakan satu-satunya sub sektor yang berperan. Sub sektor penggalan ini terdiri dari komoditi-komoditi mineral golongan C yang meliputi : pasir, batu gunung, dolomit, batu kumpang, batu kapur, fospat dan sebagainya.

Sektor bangunan adalah sektor kedua yang memiliki nilai DLQ terbesar kedua yaitu sebesar 1,45. Kegiatan ekonomi sektor ini mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dan irigasi,

eksplorasi, minyak bumi, maupun jaringan listrik, gas, air minum, telephone dan sebagainya .

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mempunyai nilai DLQ sebesar 1,40. Sub sektor yang banyak memberikan sumbangannya adalah sub sektor lembaga keuangan non bank, seperti pinjaman yang dapat diperoleh masyarakat dari pemerintah, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT) atau pinjaman-pinjaman lain.

Sektor industri pengolahan adalah sektor yang memiliki nilai DLQ sebesar 1,33. Dapat diartikan di masa yang akan datang sektor ini akan dapat bersaing dengan sektor lain di wilayah himpunan, apabila dapat ditingkatkan nilai saingnya. Sektor ini terdiri dari sub sektor industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga.

Sektor jasa-jasa adalah sektor terakhir yang memiliki nilai DLQ sebesar 1,28. Sub sektor yang memberikan nilai tambah terbesar adalah sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan. Indikasi ini dapat dilihat dengan banyaknya pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, panti asuhan, panti wreda, dan instansi kesehatan (rumah sakit, dokter praktek, dan jasa kesehatan lainnya yang dikelola oleh swasta). Adapun nilai DLQ sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Perhitungan Nilai DLQ Kabupaten Lamongan Pada Tahun 1993-1999

No	Sektor Ekonomi	DLQ
1	Pertanian	0,72
2	Pertambangan dan Penggalian	3,06
3	Industri Pengolahan	1,33
4	Listrik, Gas dan Air bersih	0,69
5	Bangunan	1,45
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,82
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,94
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,40
9	Jasa – Jasa	1,28

Sumber : Lampiran 23

4.2.4 Analisis Koefisien Pergeseran (Coefficient Resuffie = $C R$)

Coefficient Resuffie merupakan alat analisis yang menunjukkan pergeseran suatu sektor atau sub sektor ekonomi. Jika sektor atau sub sektor memiliki nilai CR lebih dari nol atau positif maka dapat dikatakan bahwa sektor atau sub sektor ini mengalami pergeseran pada kegiatan ekonomi, sebaliknya jika nilai CR kurang dari nol atau negatif, maka sektor ini tidak mengalami suatu pergeseran pada kegiatan ekonominya sehingga sektor atau sub sektor ini kurang memberikan sumbangan nilai pada kegiatan ekonomi daerah.

Dari hasil perhitungan koefisien pergeseran pada lampiran 22 dapat diketahui nilai Coefisient Resuffie masing-masing sektor atau sub sektor (lihat tabel 15).

Tabel 15. Hasil Perhitungan Coefisien Pergeseran Sektor Ekonomi tahun 1996 – 1999 ADHK 1993

No	Sektor ekonomi	CR
1	Pertanian	0,0274
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0073
3	Industri Pengolahan	0,0049
4	Listrik, gas dan air bersih	-0,0053
5	Bangunan	0,0225
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-0,0348
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-0,0126
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,0110
9	Jasa – Jasa	-0,0204

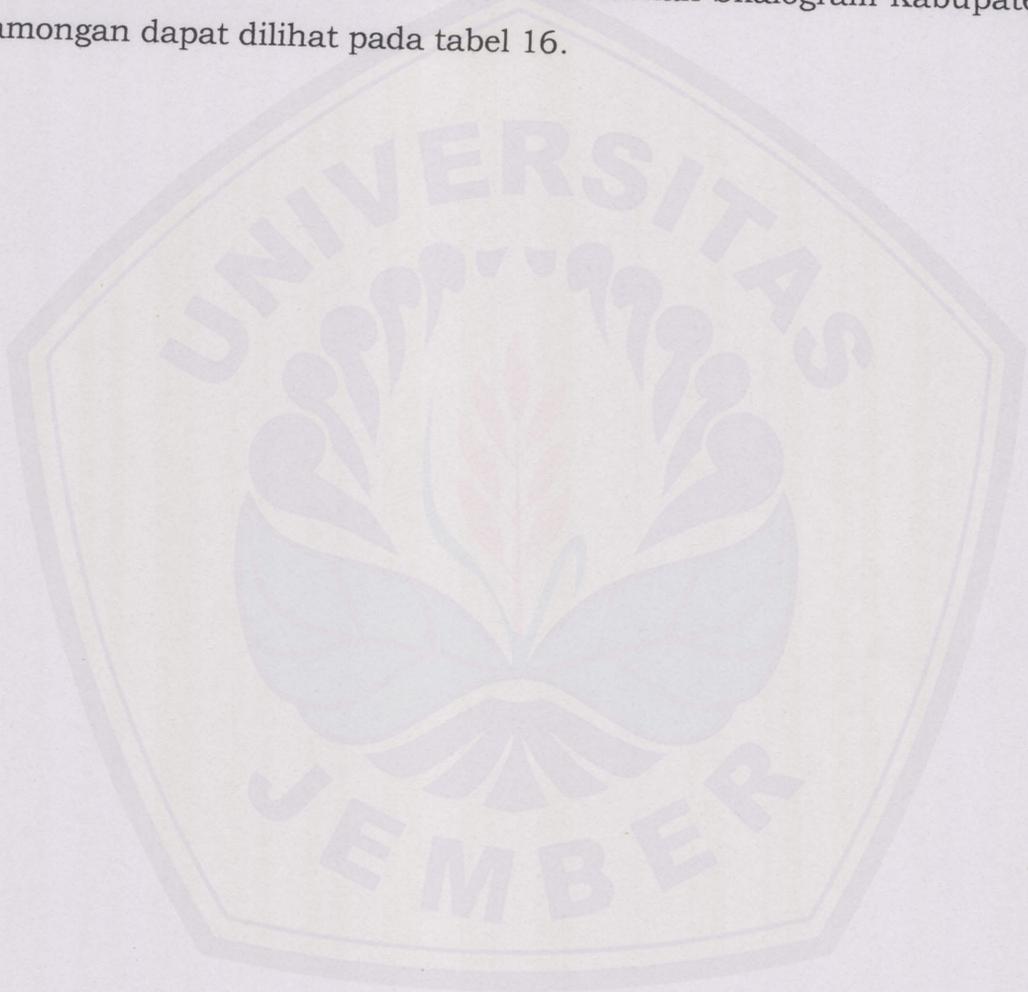
Sumber : Lampiran 26

Hasil perhitungan koefisien pergeseran (CR) menunjukkan terdapat lima sektor ekonomi memiliki nilai lebih dari nol yaitu masing – masing secara berurutan adalah sektor pertanian dengan nilai CR sebesar 0,0274, sektor bangunan dengan nilai sebesar 0,0225, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai sebesar 0,0110, sektor pertambangan sebesar 0,0073 dan sektor industri pengolahan sebesar 0,0049. Sektor–sektor di atas adalah sektor–sektor yang memiliki kecenderungan menguat dibandingkan sektor–sektor lain yang memiliki nilai CR kurang dari nol atau negatif.

4.2.5 Analisis Penentuan Sektor Prioritas

Untuk menentukan sektor prioritas yang ada di Kabupaten Lamongan digunakan empat indikasi yaitu : Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), koefisien pergeseran (CR),

dan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perangkingan keempat indikasi tersebut menggunakan analisis Skalogram (Skalling). Analisis Skalling adalah analisis yang didasarkan pada perangkingan nilai dari berbagai indikasi-indikasi sektor-sektor ekonomi. Analisis sektor prioritas berdasarkan Skalogram Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 16.



Tabel 16. Penentuan Sektor Prioritas Berdasarkan Skalogram Indikator LQ, DLQ, CR, dan PAD Kabupaten Lamongan Tahun 1993-1999 ADHK 1993

No	Sektor Ekonomi	LQ								DLQ	CR	PAD	Total	Skalling	Ranking
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999							
1.	Pertanian	2,50	2,46	2,65	2,53	2,68	2,55	2,55	0,72	0,027	155,34	174,007	100	1	
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,09	0,09	0,11	0,13	0,21	0,23	3,06	0,007	45,92	49,907	5,24	8	
3.	Industri Pengolahan	0,20	0,21	0,22	0,28	0,26	0,26	0,26	1,32	0,004	40,03	43,044	0	9	
4.	Listrik, Gas, dan air Bersih	0,24	0,23	0,21	0,21	0,23	0,19	0,18	0,69	-0,005	50,69	52,864	7,50	7	
5.	Bangunan	0,68	0,63	0,66	0,63	0,66	0,83	0,94	1,45	0,022	57,84	64,342	16,26	6	
6.	Perdagangan, Hotel dan Rest.	0,97	0,92	0,92	0,95	0,92	0,80	0,78	0,81	-0,034	64,87	71,905	22,03	5	
7.	Angkutan dan Komunikasi	0,37	0,36	0,37	0,42	0,44	0,38	0,35	0,94	-0,012	60,55	64,167	16,13	4	
8.	Keu, Persew dan jasa Komunikasi	0,74	0,72	0,77	0,82	0,80	0,92	0,99	1,40	0,011	99,00	106,171	48,21	2	
9.	Jasa - Jasa	1,15	0,28	1,48	1,67	1,66	1,44	1,43	1,28	-0,020	80,07	90,439	36,19	3	

Sumber : lampiran 7,8,9 10,11,12,13,20,21,22

4.3 Pembahasan

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama mengambil inisiatif pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakat dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menakar potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999 : 109).

Tujuan pembangunan daerah dapat dicapai apabila daerah dapat melakukan pemilihan sektor-sektor ekonomi daerah yang bersangkutan. Identifikasi potensi dari setiap sektor ekonomi berguna untuk mengetahui keunggulan komperatif dan kompetitif suatu sektor. Dalam konteks kekhasan daerah maka yang lebih diutamakan adalah keunggulan suatu sektor pada suatu daerah dihadapan daerah lain (Yuwono, 1999 : 46). Setelah diketahui potensi masing-masing, yaitu kekuatan dan kelemahan sektor ekonomi maka dapat ditentukan sektor mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah.

Hasil analisis menunjukkan sektor-sektor yang menjadi sektor basis atau sektor prioritas yang perlu dikembangkan lebih lanjut guna memberikan peranan yang besar bagi pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil perhitungan LQ menunjukkan terdapat dua sektor ekonomi yaitu sektor pertanian dan jasa-jasa yang memiliki nilai LQ lebih besar dari nol. Dapat diartikan sektor pertanian di Kabupaten Lamongan merupakan sektor basis, dan merupakan sektor ekonomi dengan perolehan nilai LQ paling besar

diantara sektor-sektor ekonomi lainnya. Nilai LQ sektor pertanian rata - rata pada tahun 1993 - 1999 sebesar 2,55. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian mampu melayani pasar daerah dan pasar luar daerah Kabupaten Lamongan.

Penetapan prioritas pembangunan pada sektor pertanian bukan berarti pemerintah mengesampingkan sektor-sektor yang lain untuk dikembangkan, sebaliknya dengan memprioritaskan sektor pertanian dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan *sprite effect* terhadap sektor - sektor lain sehingga pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Lamongan dapat dicapai.

Sektor jasa - jasa adalah sektor prioritas kedua karena memiliki nilai LQ lebih besar dari satu, yaitu rata - rata per tahun 1993-1999 sebesar 1,44. Nilai LQ sektor ini mengalami kenaikan pada tahun 1996 sebesar 1,67 dibandingkan tahun 1995 sebesar 1,49. Dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 1997 dengan nilai LQ sebesar 1,66. Sektor ini mengalami penurunan kembali pada tahun 1998-1999 dengan nilai LQ berturut-turut sebesar 1,44 dan 1,42.

Analisis LQ mempunyai kelemahan karena memiliki kriteria yang bersifat statis yaitu hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Yang diartikan bahwa sektor yang unggul pada tahun ini belum tentu unggul pada tahun akan datang, sebaliknya sektor yang belum unggul pada saat ini akan unggul dimasa akan datang (Yuwono, 199:48). Sebagai alternatif dari kelemahan LQ digunakan analisis Dinamic Location Quotient (DLQ). Dynamic Location Quetient membandingkan tingkat laju pertumbuhan sektor atau sub sektor antara daerah dan daerah himpunannya dengan acuan rata - rata pertumbuhan sektor atau sub sektor tiap tahun.

Berdasarkan perhitungan Dynamic Location Quotient di Kabupaten Lamongan pada tahun 1996 sampai 1997 menunjukkan hasil bahwa sektor pertanian yang selama ini menjadi prioritas pembangunan kabupaten Lamongan untuk masa yang akan datang tidak dapat lagi diharapkan. Sektor pertanian memiliki nilai DLQ kurang dari satu, hal ini dapat diartikan bahwa sektor ini dimasa yang akan datang tidak dapat mencukupi kebutuhan wilayah di daerah tersebut tanpa dapat memenuhi kebutuhan di daerah lain.

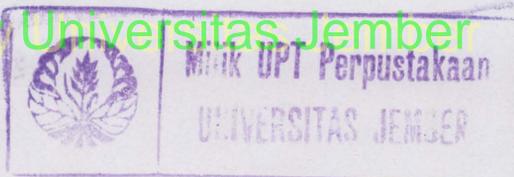
Perhitungan DLQ menunjukkan terdapat lima sektor ekonomi yang mempunyai nilai Dynamic Location Quotient lebih besar dari satu, yaitu masing-masing sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai Dynamic Location Quotient yang cukup besar yaitu 3,06. Keberhasilan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor prioritas utama dimasa yang akan datang lebih banyak disebabkan oleh terpuruknya pertumbuhan sektor tersebut di propinsi Jawa Timur yang mencapai -14,00 %. Pertumbuhan rata-rata tiap tahun sektor penggalian dan pertambangan di Kabupaten Lamongan cukup besar yaitu 6,49%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial di masa yang akan datang sehingga memerlukan peningkatan pengelolaan dengan target prioritas yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penggalian muncul sebagai sub sektor prioritas karena kekayaan alam yang dimiliki kabupaten Lamongan dimana wilayah bagian utara dan selatan merupakan pegunungan kapur dan berbatu serta banyaknya unit penggalian yang dimiliki

dengan material pasir, batu gunung, dolomit, batu kapur dan sebagainya.

Sektor-sektor ekonomi yang lain, seperti sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian kurang dapat bersaing di masa yang akan datang karena memiliki nilai DLQ kurang dari satu.

Berdasarkan perhitungan koefisien pergeseran (CR) tahun 1996-1999 di Kabupaten Lamongan terdapat lima sektor ekonomi yang memiliki kecenderungan menguat karena memiliki nilai lebih besar dari nol atau positif, dibanding sektor-sektor yang lain. Kelima sektor tersebut masing-masing adalah sektor pertanian, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Untuk sektor-sektor yang lain belum memiliki kecenderungan menguat karena nilai CRnya kurang dari nol atau negatif.

Berdasarkan perhitungan analisis penentuan sektor prioritas yang berdasarkan indikator LQ, DLQ, koefisien pergeseran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa urutan pertama sektor prioritas adalah sektor pertanian dengan nilai skalling 100, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menduduki urutan kedua dengan nilai skalling 83,48, dan diikuti sektor jasa-jasa dengan nilai skalling 44,60. Sektor – sektor ekonomi yang lain yang menjadi sektor prioritas secara berurutan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor bangunan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan dan komunikasi yang menempati urutan terakhir.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1). Berdasarkan analisis penentuan sektor prioritas dengan indikator LQ, DLQ, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dirangking dengan analisis skalling diperoleh kesimpulan bahwa sektor ekonomi yang diprioritaskan di Kabupaten Lamongan secara berurutan adalah sektor pertanian dengan nilai skalling sebesar 100, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati urutan kedua dengan nilai skalling sebesar 83,48, diikuti sektor jasa-jasa dengan nilai skalling sebesar 44,60 diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran, bangunan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan komunikasi, dan angkutan dan komunikasi sebagai sektor prioritas urutan terakhir.
- 2). Berdasarkan perhitungan Coefisient Resufle (CR) diperoleh kesimpulan terdapat lima sektor ekonomi yang memiliki kecenderungan menguat, masing - masing adalah sektor pertanian dengan nilai Coefisient Resuffle dengan nilai 0,0274, sektor bangunan sebesar 0,0225, sektor keuangan, sektor persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,0110, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,0073 dan sektor industri pengolahan sebesar 0,0049. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Lamongan dalam jangka waktu 1996 - 1999 belum mengalami pergeseran struktural yang ditunjukkan dengan peranan sektor primer yaitu sektor pertanian yang masih mendominasi.

5.2 Saran

- 1). Dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Lamongan, hendaknya pemerintah daerah harus lebih memperhatikan sektor pertanian yang menjadi sektor prioritas dan memiliki keunggulan berupa kekhasan daerah yang tidak dimiliki daerah lain.
- 2). Sektor-sektor ekonomi yang memiliki kecenderungan menguat, meskipun bukan sektor prioritas hendaknya dapat dijadikan pertimbangan bagi pembangunan wilayah.
- 3). Adanya tingkat persaingan antar sektor khususnya sektor pertanian. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian agar sektor pertanian dapat menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Penggunaan teknologi tepat guna merupakan salah satu alternatif yang efektif karena dapat menghasilkan produk yang berkualitas.
- 4). Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia berupa skill dan keahlian, teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor prioritas pembangunan daerah, seperti pembangunan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L 1991. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
-1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Yogyakarta*: BPFE.
- Azis, I. J. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : BPFE-UI.
- Badan Pusat Statistik. 1999a. *Kabupaten Lamongan dalam angka tahun 1998*. Surabaya : BPS Jawa Timur.
- 1999b. *Surabaya dalam Angka Tahun 1998*. Surabaya : BPS Jawa Timur.
- Budiharsono, S. 1989. *Perencanaan Pembangunan wilayah : Teori Model Perencanaan dan Penerapannya*, PAU- Ekonomi UI, Jakarta.
- Glasson, J. 1990 *Pengantar Perencanaan Regional, Terjemahan Paul Sitohang*. Jakarta : LPFE – UI
- Irawan dan Suparmoko. 1992. *Ekonomi Pembangunan (Edisi V)* Yogyakarta : BPFE – UGM.
- Irawati, E. 2000. *Analisis Penetapan Sektor Prioritas dalam Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994-1998*, skripsi.
- Kantor Pusat Statistik Lamongan. 1998. *Produk domestik Regional Bruto Kabupaten Lamongan Tahun 1993-1999*. Lamongan.
- Mukaromah, 2000. *Analisis Penetapan Prioritas sektoral di Kabupaten Jember Tahun 1994-1998*, skripsi.
- Mutoharoh, 1998. *Analisis Penentuan Prioritas Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Tingkat II Moioekerto*. skripsi.

- Richardson, HW. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan Paul Sitohang*. Jakarta : LPFE – UI.
- Soebardi, dkk, 1998, *Materi Pokok Ekonomi Perencanaan II*, karunika UT, Jakarta.
- Supriatna, T. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, B. 1993. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : CV Haji Masagung.
- Universitas Jember. 1999. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi.
- Yuwono, 2000. *Jurnal Kritis Volume XII nomer 2*

Lampiran 1: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamongan Tahun 1993-1999 ADHK 1993
(dalam juta Rupiah)

No Sektor Ekonomi	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1 Pertanian	447,440.43	444,819.54	464,518.21	453,839.97	483,920.14	493,997.31	507,410.50
2 Pertambangan dan Penggalian	1,553.91	1,671.39	1,711.75	1,881.27	1,980.27	2,066.64	2,200.06
3 Industri Pengolahan	46,609.95	56,096.65	62,557.09	85,412.95	88,101.68	77,283.23	77,915.86
4 Listrik, Gas, dan Air bersih	3,225.04	3,479.50	3,809.38	4,245.53	4,561.89	4,539.42	4,740.12
5 Bangunan	38,381.61	40,684.50	45,385.83	46,513.99	50,423.17	48,048.05	49,778.40
6 Perdagangan, hotel, dan restoran	179,765.81	187,805.21	195,318.57	214,901.91	221,131.53	180,637.25	182,648.40
7 Angkutan dan Komunikasi	22,536.69	23,789.01	25,476.19	30,408.09	32,602.64	30,162.47	31,511.93
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perus	46,000.06	48,100.79	51,352.59	56,947.11	58,038.47	60,003.45	61,116.03
9 Jasa-Jasa	122,062.18	142,023.21	160,152.89	184,420.63	187,861.90	174,367.98	176,492.96
Total PDRB	907,575.68	948,469.80	1,010,282.50	1,078,571.45	1,128,621.69	1,071,105.80	1,093,814.26

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, 1999

Lampiran 2: Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Tahun 1993-1999 ADHK 1993
(dalam juta rupiah)

No Sektor Ekonomi	1993	1994	1995	1996	1997
1 Pertanian	9,669,099.42	9,666,049.56	9,866,092.64	10,253,902.38	10,360,819.63
2 Pertambangan dan Penggalian	959,439.26	955,206.92	970,066.58	982,419.95	875,822.63
3 Industri Pengolahan	12,382,976.47	13,990,976.06	15,802,744.63	17,698,276.00	19,409,565.66
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih	716,129.90	787,544.59	1,011,891.73	1,139,846.68	1,143,104.29
5 Bangunan	3,049,827.24	3,433,305.97	3,854,810.05	4,239,635.33	4,370,532.83
6 Perdagangan, hotel, dan restoran	10,017,908.52	10,911,198.61	11,866,746.64	12,993,706.42	13,828,696.97
7 Angkutan dan Komunikasi	3,262,743.64	3,504,855.31	3,800,166.09	4,162,807.67	4,236,276.08
8 Keuangan, Perse & Jasa Kom	3,371,935.36	3,563,710.85	3,766,255.56	3,979,808.69	4,145,932.45
9 Jasa-Jasa	5,741,287.68	5,914,632.87	6,101,730.07	6,302,065.91	6,483,125.59
Total PDRB	49,173,340.49	52,729,474.74	45,173,757.35	61,752,469.03	64,853,575.86

Sumber : BPS prop. Jawa Timur, 1999

1998	1999
1.06	10,004,104.03
8.67	483,149.93
8.20	16,064,191.66
4.65	1,332,448.18
1.24	2,667,858.49
7.36	11,722,811.23
6.25	4,443,028.71
3.66	3,107,423.21
5.66	5,213,111.13
6.74	55,038,126.58

Lampiran 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan tahun 1994 - 1999 ADHK 1993 (dalam persen)

No Sektor Ekonomi	1994	1995	1996	1997	1998
1 Pertanian	0.59	4.43	-2.30	6.63	2.08
2 Pertambangan dan Penggalian	7.56	2.41	9.90	5.26	4.36
3 Industri Pengolahan	20.35	11.52	36.54	3.15	-12.28
4 Listrik, Gas, dan Air bersih	7.90	9.47	11.45	7.45	-0.49
5 Bangunan	6.00	11.56	2.49	8.40	-4.71
6 Perdagangan, hotel, dan restoran	4.47	4.00	10.03	2.90	-18.31
7 Angkutan dan Komunikasi	5.56	7.09	19.36	7.22	-7.48
8 Keuangan, Persew & Jasa Perus	4.57	6.76	10.89	1.92	3.39
9 Jasa-Jasa	16.35	12.77	15.15	1.87	-7.18
Total PDRB	4.51	6.52	6.76	4.64	-5.10

Sumber : BPS Kab. Lamongan, 1999

1999
2.72
6.46
0.82
4.42
3.60
1.11
4.47
1.85
1.22
2.12

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur tahun 1994-1999 ADHK 1993 (dalam persen)

No Sektor Ekonomi	1994	1995	1996	1997	1998
1 Pertanian	-0.03	2.06	4.94	1.04	-5.02
2 Pertambangan dan Penggalian	-0.44	1.55	1.27	-10.88	-42.68
3 Industri Pengolahan	12.98	12.94	11.99	9.67	-22.18
4 Listrik, Gas, dan Air bersih	9.97	28.48	12.64	0.28	3.16
5 Bangunan	12.57	12.27	9.98	3.09	-33.22
6 Perdagangan, Hotel, & restoran	8.91	8.75	9.53	6.43	-17.78
7 Angkutan dan Komunikasi	7.41	8.42	9.63	1.70	-4.37
8 Keua, Persewaan & Jasa Perush	5.68	5.68	5.67	4.17	-20.49
9 Jasa-Jasa	3.01	3.16	3.67	2.87	-5.32
Total PDRB	7.23	8.18	8.26	5.02	-16.12

Sumber : BPS Prop Jawa Timur, 1999

1999
1.66
-3.71
-0.26
12.99
-8.58
3.11
9.67
-5.73
1.22
1.18

Lampiran 5. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 1996-1999 (dalam persen)

No	Sektor Ekonomi	1993	1994	1995	1996	1997
1	Pertanian	49.31	45.18	45.98	42.07	42.88
2	Pertambangan dan Penggalian	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17
3	Industri Pengolahan	5.13	5.7	6.19	7.92	7.81
4	Listrik, Gas, dan Air bersih	0.36	0.35	0.38	0.40	0.40
5	Bangunan	4.23	4.13	4.49	4.31	4.47
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	19.8	19.07	19.33	19.92	19.59
7	Angkutan dan Komunikasi	2.48	2.42	2.52	2.82	2.89
8	Keua, Persew & Jasa Perusahaan	5.07	4.88	5.08	5.27	5.14
9	Jasa-Jasa	13.54	14.43	15.85	17.11	16.65
	Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kab Lamongan, 1999

1998	1999
46.12	46.40
0.19	0.20
7.22	7.12
0.42	0.43
4.49	4.45
16.86	16.70
2.82	2.88
5.60	5.59
16.28	16.13
00.00	100.00

Lampiran 6. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Pembentukan PDRB
Propinsi Jawa Timur Tahun 1993-1999 (dalam persen)

No	Sektor Ekonomi	1993	1994	1995	1996	1997
1	Pertanian	19.66	18.33	17.29	16.60	15.98
2	Pertambangan dan Penggalian	1.95	1.81	1.71	1.59	1.35
3	Industri Pengolahan	25.18	26.54	27.71	28.66	29.93
4	Listrik, Gas, dan Air bersih	1.45	1.49	1.77	1.85	1.76
5	Bangunan	6.21	6.51	6.75	6.87	6.74
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	20.37	20.69	20.81	21.04	21.32
7	Angkutan dan Komunikasi	6.64	6.65	6.66	6.74	6.53
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perus	6.86	6.76	6.61	6.44	6.39
9	Jasa-Jasa	11.68	11.22	10.69	10.20	9.99
Total PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

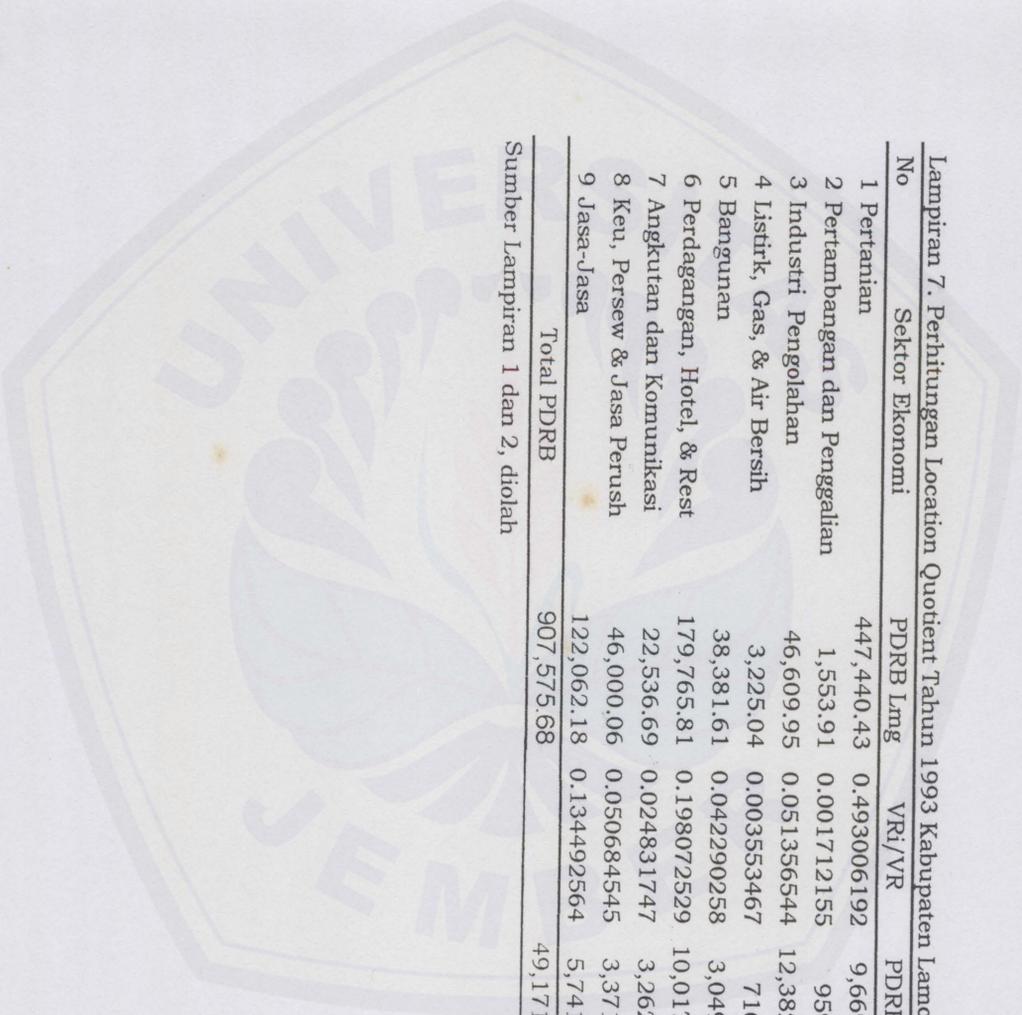
Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, 1999

1998	1999
18.09	18.18
0.92	0.87
27.76	27.37
2.17	2.42
5.36	4.85
20.90	21.30
7.45	8.07
6.06	5.64
11.28	11.29
00.00	100.00

Lampiran 7. Perhitungan Location Quotient Tahun 1993 Kabupaten Lamongan ADHK 1993

No	Sektor Ekonomi	PDRB Lmg	VRi/VR	PDRB Jatim	Vi/V	LQ 93
1	Pertanian	447,440.43	0.493006192	9,669,099.42	0.196640928	2.507139262
2	Pertambangan dan Penggalian	1,553.91	0.001712155	959,439.26	0.019512161	0.087748083
3	Industri Pengolahan	46,609.95	0.051356544	12,382,976.47	0.251833173	0.203930812
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	3,225.04	0.003553467	716,129.90	0.014563967	0.243990299
5	Bangunan	38,381.61	0.042290258	3,049,827.24	0.06202448	0.681831732
6	Perdagangan, Hotel, & Rest	179,765.81	0.198072529	10,017,908.52	0.203734675	0.972208233
7	Angkutan dan Komunikasi	22,536.69	0.024831747	3,262,743.64	0.06635457	0.374228138
8	Keu, Persew & Jasa Perush	46,000.06	0.050684545	3,371,935.36	0.068575208	0.739108876
9	Jasa-Jasa	122,062.18	0.134492564	5,741,287.68	0.116760837	1.151863651
	Total PDRB	907,575.68		49,171,347.49		

Sumber Lampiran 1 dan 2, diolah



Lampiran 8. Perhitungan Location Quotient Tahun 1994 Kabupaten Lamongan ADHK 1993

No	Sektor Ekonomi	PDRB Lmg	VRi/VR	PDRB Jatim	Vj/V	LQ 94
1	Pertanian	444,819.54	0.46898639	9,666,049.56	0.183320906	2.55828099
2	Pertambangan dan Penggalian	1,671.39	0.001762196	955,206.92	0.018115922	0.097273321
3	Industri Pengolahan	56,096.65	0.059144356	13,990,976.06	0.265345051	0.222896022
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	3,479.74	0.003668793	787,544.59	0.014936132	0.245632058
5	Bangunan	40,684.50	0.042894871	3,433,305.97	0.065114167	0.658764032
6	Perdagangan, Hotel, & Rest	187,805.21	0.198008584	10,911,198.61	0.206935709	0.956860396
7	Angkutan dan Komunikasi	23,789.01	0.025081456	3,504,855.31	0.066471132	0.377328561
8	Keu, Persew & Jasa Perush	48,100.79	0.050714085	3,563,710.85	0.067587353	0.750348735
9	Jasa-Jasa	142,023.21	0.149739269	5,914,632.87	0.112173629	1.334888333
Total PDRB		948,470.04		52,727,480.74		

Sumber Lampiran 1 dan 2, diolah



Lampiran 9. Perhitungan Location Quotient Tahun 1995 Kabupaten Lamongan ADHK 1993

No	Sektor Ekonomi	PDRB Lmg	VRi/VR	PDRB Jatim	Vi/V	LQ 95
1	Pertanian	464,518.21	0.459790415	9,866,092.64	0.172966435	2.658263809
2	Pertambangan dan Penggalian	1,711.75	0.001694328	970,066.58	0.017006627	0.09962752
3	Industri Pengolahan	62,557.09	0.061920394	15,802,744.63	0.277044267	0.223503609
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	3,809.38	0.003770609	1,011,891.73	0.017739881	0.212549836
5	Bangunan	45,385.83	0.0449239	3,854,810.05	0.067580224	0.6647492
6	Perdagangan, Hotel, & Rest	195,318.57	0.193330648	11,866,746.64	0.208040705	0.929292409
7	Angkutan dan Komunikasi	25,476.19	0.025216897	3,800,166.09	0.066622239	0.378505701
8	Keu, Persew & Jasa Perush	51,352.59	0.050829931	3,766,255.56	0.06602774	0.769826914
9	Jasa-Jasa	160,152.89	0.158522879	6,101,730.07	0.106971882	1.481911651
Total PDRB		1,010,282.50		57,040,503.99		

Sumber Lampiran 1 dan 2, diolah

Lampiran 10. Perhitungan Location Quotient Tahun 1996 Kabupaten Lamongan ADHK 1993

No	Sektor Ekonomi	PDRB Lmg	VRI/VR	PDRB Jatim	Vi/V	LQ 96
1	Pertanian	453,839.97	0.420778772	10,253,902.38	0.16604846	2.534077
2	Pertambangan dan Penggalian	1,881.27	0.001744224	982,419.95	0.015908999	0.10966
3	Industri Pengolahan	85,412.95	0.079190813	17,698,276.00	0.286600298	0.276310
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	4,245.53	0.003936253	1,139,846.68	0.018458318	0.213256
5	Bangunan	46,513.99	0.043125553	4,239,635.33	0.068655317	0.628144
6	Perdagangan, Hotel, & Rest	214,901.91	0.1992468	12,993,706.42	0.210415982	0.946918
7	Angkutan dan Komunikasi	30,408.09	0.028192931	4,162,807.67	0.067411194	0.418223
8	Keu, Persew & Jasa Perush	56,947.11	0.052798644	3,979,808.69	0.064447766	0.819247
9	Jasa-Jasa	184,420.63	0.170986011	6,302,065.91	0.102053667	1.675451
	Total PDRB	1,078,571.45		61,752,469.03		

Sumber Lampiran 1 dan 2, diolah

Lampiran 1.1. Perhitungan Location Quotient tahun 1997 Kabupaten Lamongan ADHK Tahun 1993

No	Sektor Ekonomi	PDRB Lmg	VRi / VR	PDRB Jatim	Vi/V	LQ 97
1	Pertanian	483,920.14	0.42877090	10,360,819.63	0.15975711	2.683892511
2	Pertambangan dan Penggalian	1,980.27	0.00175459	875,522.36	0.01349999	0.129969875
3	Industri Pengolahan	88,101.68	0.07806130	19,409,565.66	0.29928289	0.260827818
4	Listrik, Gas, dan Air bersih	4,561.89	0.00404200	1,143,104.29	0.01762593	0.22932135
5	Bangunan	50,423.17	0.04467677	4,370,532.83	0.06739078	0.662950791
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	221,131.53	0.19593060	13,828,696.97	0.21322952	0.918871847
7	Angkutan dan Komunikasi	32,602.64	0.02888713	4,236,276.08	0.06532062	0.442235954
8	Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	58,038.47	0.05142420	4,145,932.45	0.06392758	0.804413347
9	Jasa-Jasa	187,861.90	0.16645250	6,483,125.59	0.09996558	1.665098043
Total PDRB		1,128,621.69		64,853,575.86		

Sumber : Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 12. Perhitungan Location Quotient Tahun 1998 Kabupaten Lamongan ADHK Tahun 1993

No	Sektor Ekonomi	PDRB Lmg	VRI / VR	PDRB Jatim	Vi/V	LQ 98
1	Pertanian	493,997.31	0.46120353	9,840,471.06	0.18089468	2.549569305
2	Pertambangan dan Penggalian	2,066.64	0.00192945	501,798.67	0.00922443	0.209167137
3	Industri Pengolahan	77,282.23	0.07215188	15,104,078.20	0.27765413	0.25986246
4	Listrik, Gas, dan Air bersih	4,539.42	0.00423807	1,179,194.65	0.02167681	0.195511808
5	Bangunan	48,048.05	0.04485840	2,918,521.24	0.05365038	0.836124665
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	180,637.25	0.16864573	11,369,207.36	0.20899702	0.806928866
7	Angkutan dan Komunikasi	30,162.47	0.02816015	4,051,086.25	0.07447001	0.378140801
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perus	60,003.45	0.05602015	3,296,433.66	0.06059744	0.924464009
9	Jasa-Jasa	174,367.98	0.16279264	6,138,105.66	0.11283511	1.442748072
Total PDRB		1,071,104.80		54,398,896.74		

Sumber :Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 13. Perhitungan Location Quotient Tahun 1999 Kabupaten Lamongan ADHK 1993

No	Sektor Ekonomi	PDRB Lmg	VRi/VR	PDRB Jatim	Vi/V	LQ
1	Pertanian	507,410.50	0.463890917	10,004,104.03	0.181766798	2
2	Pertambangan dan Penggalian	2,200.06	0.002011365	483,149.93	0.008778459	0
3	Industri Pengolahan	77,915.86	0.071233173	15,064,191.66	0.273704659	0
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	4,740.12	0.004333569	1,332,448.18	0.024209548	0
5	Bangunan	49,778.40	0.045509006	2,667,858.49	0.048472916	0
6	Perdagangan, Hotel, & Rest	182,648.40	0.166983012	11,722,811.23	0.212994372	0
7	Angkutan dan Komunikasi	31,511.93	0.028809215	4,443,028.71	0.08072638	0
8	Keu, Persew & Jasa Perush	61,116.03	0.05587423	3,107,423.21	0.056459466	0
9	Jasa-Jasa	176,492.96	0.161355512	6,213,111.13	0.112887402	1.
Total PDRB		1,093,814.26		55,038,126.57		

Sumber Lampiran 1 dan 2, diolah

121302
125099
255609
002489
554312
778517
774852
634442
49147

Lampiran 14. Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Lamongan Tahun 1996 ADHK Tahun 1993

No.	Sektor Ekonomi	PDRB Lmgn	Vri/VR	PDRB Jatim	VI
1	Pertanian	453,839.97	0.42078	10,253,902.38	0.1
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	349,229.32	0.32379	6,600,805.73	0.1
	1.2 Tanaman Perkebunan	11,736.91	0.01088	1,837,424.94	0.0
	1.3 Perternakan	14,502.36	0.01345	941,224.07	0.0
	1.4 Kehutanan	1,137.69	0.00105	256,103.35	0.0
	1.5 Perikanan	77,233.69	0.07161	618,344.29	0.0
2	Jasa	184,420.69	0.17099	6,302,065.91	0.1
	a. Pemerintahan Umum	104,517.67	0.0969	2,832,460.38	0.0
	b. Swasta	79,902.96	0.07408	2,368,605.53	0.0
	1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	35,097.46	0.03254	742,012.93	0.0
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	222.34	0.00021	33,794.70	0.0
	3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	44,583.16	0.04134	2,693,797.90	0.0
	PDRB	1,078,571.45		61,752,469.03	

Sumber : Lampiran 1, 2, 10, diolah

5	2.53407
6	3.02914
7	0.36572
8	0.88217
9	0.25434
10	7.15125
11	1.67545
12	2.19267
13	1.99141
14	2.70813
15	0.37668
16	0.94757

Lampiran 15. Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Lamongan Tahun 1997 ADHK Tahun 1993

No.	Sektor Ekonomi	PDRB Lmgn	Vt/VR	PDRB Jatim	Vt/VN
1	Pertanian	483,920.14	0.428770902	10,360,819.63	0.15975
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	365,113.86	0.323504203	6,431,144.49	0.09916
	1.2 Tanaman Perkebunan	17,321.01	0.015347047	1,992,631.23	0.03072
	1.3 Peternakan	16,615.54	0.014721975	1,011,884.61	0.01560
	1.4 Kehutanan	935.00	0.000828444	259,298.48	0.00399
	1.5 Perikanan	83,934.75	0.074369251	665,960.82	0.01026
2	Jasa	187,861.90	0.166452498	6,483,125.59	0.09996
	a. Pemerintahan Umum	106,051.67	0.093965649	2,953,100.48	0.04553
	b. Swasta	81,810.23	0.072486849	3,530,025.11	0.05443
	1. Jasa Sosial Masyarakat	36,467.09	0.032311172	811,388.96	0.01251
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	267.60	0.000237103	37,819.16	0.00058
	3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	45,075.74	0.03993875	2,680,816.99	0.04133
	PDRB	1,128,621.69		64,853,575.86	

Sumber : Lampiran 1, 12, 11, diolah

7	2.683892511	LQ 97
9	3.262312701	
9	0.49949577	
3	0.943558876	
4	0.207203542	
3	7.242335782	
4	1.665098043	
1	2.063596688	
3	1.531727456	
1	2.582602394	
7	0.406592876	
5	0.966187095	

Lampiran 16. Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Lamongan Tahun 1998 ADHK Tahun 1993

No.	Sektor Ekonomi	PDRB Lmgn	Vri/VR	PDRB Jatim
1	Pertanian	493,997.31	0.461203526	9,840,471.06
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	367,747.06	0.34333434	6,448,069.42
	1.2 Tanaman Perkebunan	9,905.17	0.00924762	1,527,057.75
	1.3 Perternakan	14,029.99	0.013098616	883,726.90
	1.4 Kehutanan	1,872.46	0.001748158	233,168.31
	1.5 Perikanan	100,442.63	0.093774792	748,448.67
2	Jasa	174,367.98	0.162792642	6,138,105.66
	a. Pemerintahan Umum	108,005.77	0.100835857	2,877,668.87
	b. Swasta	66,362.21	0.061956785	3,260,436.79
	1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	23,790.13	0.022210833	655,728.27
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	235.26	0.000219642	29,078.72
	3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	42,336.82	0.03952631	2,575,629.80
	PDRB	1,071,104.80		54,398,896.74

Sumber : Lampiran 1, 2, 12, diolah

VI/Y	LQ 98
180894681	2.549569305
118583092	2.896527335
028071484	0.329431102
016245309	0.806301398
004286269	0.407850642
013758527	6.815758301
112835113	1.442748072
052899398	1.906181565
059935715	1.033720626
012054073	1.842599861
000534546	0.410895073
047340096	0.834820143

Lampiran 17. Perhitungan LQ Sub Sektor Prioritas Lamongan Tahun 1999 ADHK Tahun 1993

No.	Sektor Ekonomi	PDRB Lmgn	Vt/VR	PDRB Jatim	V
	1 Pertanian	507,410.50	0.463890917	10,004,104.03	0.18
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	376,324.98	0.34404834	6,693,479.92	0.17
	1.2 Tanaman Perkebunan	10,007.53	0.009149204	1,491,946.27	0.02
	1.3 Perternakan	14,546.07	0.013298483	901,457.88	0.014
	1.4 Kehutanan	1,987.32	0.001816872	232,629.84	0.002
	1.5 Perikanan	104,544.60	0.095578019	685,190.11	0.012
	2 Jasa	176,492.96	0.161355512	6,213,111.13	0.112
	a. Pemerintahan Umum	109,205.67	0.099839318	2,839,329.21	0.051
	b. Swasta	67,287.29	0.061516194	3,373,781.92	0.061
	1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	24,405.43	0.022312225	664,718.69	0.012
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	248.64	0.000227315	31,823.79	0.000
	3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	42,633.22	0.038976654	2,677,239.43	0.04
	PDRB	1,093,814.26		55,038,126.58	

Sumber : Lampiran 1, 2, 13, diolah

LQ 99	2.552121302
798	1.828988253
533	0.337515545
505	0.811933191
789	0.429855456
703	1.6777336589
372	1.429349147
402	1.935305359
406	1.003543247
996	1.847432739
22	0.393132691
14	0.801273877
36	

Lampiran 18. Perhitungan Rata - Rata Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Lamongan Tahun 1993 - 1999 ADHK

No.	Sektor Ekonomi	PDRB 1993 (P1)	PDRB 1999 (Pn)	Pn/P1
1	Pertanian	447,440.43	507,410.50	1.134029171
2	Pertambangan dan Penggalian	1,553.91	2,200.06	1.415822023
3	Industri Pengolahan	46,609.95	77,915.86	1.671657232
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,225.04	4,740.12	1.469786421
5	Bangunan	38,381.61	49,778.40	1.296933610
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	179,765.81	184,648.40	1.027160838
7	Angkutan dan Komunikasi	22,536.69	31,511.93	1.398250142
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	46,000.06	61,116.03	1.328607615
9	Jasa - Jasa	122,062.18	176,492.96	1.445926658
	Total PDRB	907,575.68	1,095,814.26	1.207408136

Sumber : Lampiran 1, diolah

Lampiran 19. Perhitungan Rata - Rata Laju Pertumbuhan Per Sektor Propinsi Jawa Timur Tahun 19

No.	Sektor Ekonomi	PDRB 1993 (P1)	PDRB 1999 (Pn)	Pn/P1
1	Pertanian	9,669,099.42	10,004,104.03	1.034646930
2	Pertambangan dan Penggalian	959,439.26	483,149.93	0.503575318
3	Industri Pengolahan	12,382,976.47	15,064,191.66	1.216524290
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	716,129.90	1,332,448.18	1.860623582
5	Bangunan	3,049,827.24	2,667,858.49	0.874757250
6	Perdagangan, hotel dan Restoran	10,017,908.52	11,722,811.23	1.170185494
7	Angkutan dan Komunikasi	3,262,743.64	4,443,028.71	1.361746187
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,371,935.36	3,107,423.21	0.921554798
9	Jasa - Jasa	5,741,287.68	6,213,111.13	1.082180771
	Total PDRB	49,171,347.49	55,038,126.58	1.119312962

Sumber : Lampiran 2, diolah

Lampiran 20. Perhitungan DLQ Per Sektor Kabupaten Lamongan ADHK 1993

No.	Sektor Ekonomi	$(1 + gin)/(1+gn)$	$1+Gi)/(1+G)$	I
1	Pertanian	0.9899	1.03725	0.7
2	Pertambangan dan Penggalian	1.0272	0.875354	3.0
3	Industri Pengolahan	1.05603	1.01398	1.3
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.03363	1.088394	0.6
5	Bangunan	1.01221	0.95974	1.4
6	Perdagangan, hotel dan Restoran	0.9791	1.00743	0.8
7	Angkutan dan Komunikasi	1.02507	1.033219	0.5
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.016375	0.968122	1.4
9	Jasa - Jasa	1.030815	0.994397	1.2

Sumber : Lampiran 18,19, diolah

Lampiran 21 : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000-2001 (dalam juta rupiah)

No	Sektor Ekonomi	PAD 2000	PAD 2001	Tota
1	Pertanian	25.500,700.00	65,121,100.00	90
2	Pertambangan dan Penggalian	49,867,510.00	72,767,650.00	122
3	Industri Pengolahan	25,000,369.00	35,010,463	60
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,620,130,958.00	3,648,426,650.00	6,568
5	Bangunan	125,572,230.00	198,205,835.00	323
6	Perdagangan, hotel dan Restoran	718,338,400.00	1,184,366,101.12	1,9
7	Angkutan dan Komunikasi	336,874,050.00	340,878,200.00	877
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Pers.	643,256,207.87	2,180,093,820.14	1,923
9	Jasa - Jasa	1,795,718,083.50	3,033,642,289.00	5,029
	Jumlah	6,340,258,508.37	10,723,501,645.26	17,063

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2001

D
800.00
160.00
832.00
608.00
065.00
04,501
250.00
027.00
372.00
153.00

Lampiran 22. Perhitungan CR Sektor Prioritas Kabupaten Lamongan Tahun 1996 - 1999 ADHK 1993

No.	Sektor Ekonomi	1996		1999		4-2	5-3	(6)-(7)
		% Vi/VR	% Vi/V	% Vi/VR	% Vi/V			
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pertanian	42.0778	16.6048	46.389	18.1766	4.3112	1.5718	
2	Pertambangan dan Penggalian	0.1774	1.5908	0.2011	0.8778	0.0237	-0.713	
3	Industri Pengolahan	7.919	28.66	7.1233	27.3704	-0.7957	-1.2896	
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.3936	1.8458	0.4333	2.4209	0.0397	0.5751	
5	Bangunan	4.3125	6.8655	4.5509	4.8472	0.2384	-2.0183	
6	Perdagangan, hotel dan Restoran	19.9246	21.0415	16.6983	21.2994	-3.2263	0.2579	
7	Angkutan dan Komunikasi	2.8192	6.7466	2.8809	8.0726	0.0617	1.326	
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Pers.	5.2798	6.447	5.5874	5.6459	0.3076	-0.8011	
9	Jasa - Jasa	17.0986	10.2053	16.1355	11.2887	-0.9631	1.0834	

Sumber : Lampiran 1, diolah